


AG NO : 714
TGL TERIMA : 10.03.17
PARAF : 



Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperolehi Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh :
IFRI MAIDI SAPUTRA
12 231 037

JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ifri Maldi Saputra
NIM : 12 231 037
Tempat / Tanggal Lahir : Batusangkar/ 17 Januari 1993
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Maret 2017
Saya yang menyatakan


Ifri Maldi Saputra
NIM. 12 231 037


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama IFRI MAIDI SAPUTRA, NIM 12 231 037
dengan judul: "EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KASUPATEN TANAH DATAR", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan
telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang
Munawarasyah


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 15 Februari 2017

Pembimbing I


Gampito, SE., M. Si.
NIP 19670219 200501 1 005

Pembimbing II


Sri Adella Ritri, SE., M. Si.
NIP 19830713 200604 2 002

Mengetahui:



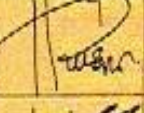

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **IFRI MAIDI SAPUTRA**, NIM. 12 231 037, judul: "EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR" telah diujikan dalam Ujian *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Ketua Sidang/ Pembimbing I		9/3-17
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 19830713 200604 2 002	Sekretaris/ Pembimbing II		9/3 2017
3	Husni Shabri, M.Si NIP. -	Penguji I		07/03 2017
4	Khairulis Shobirin, SE., MM NIP. -	Penguji II		7/3 17

Batusangkar, Maret 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah
yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan
manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman
13)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', yaitu orang-
orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa
mereka akan kembali kepada-Nya
(QS: Al-baqarah 45-46)

"Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (QS: Al-Isyirah
6-8)

**"Semua mimpi kita dapat menjadi
kenyataan, jika kita punya keberanian
untuk mewujudkannya" - Walt Disney**

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah
tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup
justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus
memerlukan pengorbanan.

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil' alamin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah Tuhanku yang Maha Agung
nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah
kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan
bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu
langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-fatihah
beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang
tiada terkira, terima kasihku untukmu.*

Skripsi ini adalah perjalanan panjang yang melelahkan dan menyita kenyamanan dengan proses yang begitu rumit, kombinasi dominan dan usaha, kesabaran dan kesungguhan, waktu dan biaya saling melengkapi setiap langkahnya. Setiap kata-katanya dilandasi dengan doa, lembar-lembarannya ditemani dengan usaha, di dalam bab-babnya dikawal kesabaran dan kesungguhan, dan lembar persembahan diiringi dengan rasa syukur atas segalanya. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikan bukan karena kita “menyerah”, tapi karena kita “berserah” kepada Allah SWT

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Mama dan Ayahku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku Mama dan Ayah terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaiikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

*Untukmu Ayah (Maizar),, Mama (Martis)...Terimakasih....
we always loving you... (ttd. Anakmu)*

*Terima kasih untuk adikku tersayang **Aldi Rianto** dan **Sherly Aniké Putri** atas banyak doa, dukungan moril dan semangat yang slalu mengiringi langkah ini hingga mengapai gelar Sarjana Ekonomi. Semoga bisa cepat nyusul juga untuk gelar sarjana ekonominya dan untuk yang kecil semoga nilainya selalu bagus di jenjang SMA ini dan juga diterima nantinya di PTN yang diinginkan. Semoga untuk kedepannya kalian berdua sukses, slalu berjuang ya jangan mudah menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit.*

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Untuk itulah penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait.

*Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Gampito, SE., M.Si.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Sri Adella Fitri, SE., M.Si** selaku dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak nasihat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di IAIN Batusangkar serta memeberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan Skripsi.*

Kepada segenap tim penguji yang menguji, penulis haturkan terima kasih yang luar biasa. Teruntuk Bapak **Husni Shabri, M.Si** dan Bapak **Khoirulis Shobirin, SE., MM** terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Terima kasih untuk keluarga besar yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga Skripsi ini terselesaikan. Terima kasih untuk **Ni reni, Ni vivi, Mak Nina, Mak Sek, Ni pit, Onga El, Tek Sasai, Ama Panti**, dan semua keluarga yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk sahabat yg dikenal dengan genk *The Muin Suci Wardah Hayati, SE, Atika Farma, SE, Hadiyati Minazzulami, SE, Indah Sohliah, SE, Rezi Wulandari, SE, Yesi Wahyuni, SE, Afdal dinil Haq, SE, Diana Syaputri, SE, Febri Julnesman* yang sudah menjadi keluarga, walaupun kita semua sering ada pertentangan dan tidak bisa mamakai toga bareng ☺ tapi itu semua tidak memudarkan rasa persahabatan kita genk, yang awalnya cupu tak saling kenal diam diam dan berujung saling sapa saling semangat slalu bersama susah, senang, duka, dan sedih. Sekarang kehidupan masing-masing akan dimulai, ifri harap kita semua berhasil bareng sehabis ini, jangan lupakan perjuangan bareng kita dulu ya.. always miss you genk (the muin musykil)..

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik"..

Terima kasih untuk semua kawan perjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2012 terkhusus untuk **AKSYA A LOVERS Asri, Hilfa, Resti, Rizka, Yori, Desi, Darni, Riri, Novi, Ainul, Fera, Fidia, Suci, Fika, Fitri, Zola, Ayu, Azizah, Indah, Yesi, Zizi, Suci wardah, Yati, Atika, Diana, Afdal, Ade, Arif, Febri** dan teman-teman local **B Rahma, Nuril, Titin, Wulan, Lila, Dewi, Mega, Wike, Neza, KD, Tantry, Nita, Rahmi, Reza, Novri, Dila, Putri, Mutia, Ony, Riza, Ridwan, Wira, Verdi**, dan teman lainnya keluarga besar Aksya angkatan 2012. Dan teruntuk kawan yang tampek mangadu katiko ado yang tasandek **Miftahus Shiddiq, SE, Tarmizi, SE** baa kabanyo kawan..? suka cita wak lalui basamo selama 4 tahun, kini tibo giliran wak lo untuk terbang tinggi untuak mangaja kawan lai, yang alah duluan wisudah dan terjun ka dunia karajo, terima kasih atas bantuan, doa, masukan selama penulisan skripsi semoga kedepannya kita sama-sama sukses, dan untuk kawan bahkan sudah seperti keluarga yang jadwal ke kampusnya cuman 4 hari, kemana-mana selalu bareng, saling menyemangati satu sama lain, yang berjuang demi sebuah toga **Panji Haorna, SE, Afdal Dinil Haq, SE**, walaupun agak sandek, banyak persimpangan dan tanjakan jalan wak genk, akhirnya makai toga juo wak jadinya, lelah juo wak dek skripsi ko nak ☺ wkwkwkwkwk

Terima kasih untuk junior **Siska Novita, Lusy Nadya Sari, Nadya Ulfa, Heny, Stevani Cindy Ananda, Aisyah, Fiki Novita Sari, Ayu Soraya, Shintya Jasmoni, Rhila Revia Aditya, Shinta Ramadhani Fitri, Ria Depita, Dewita Kumala Sari, Febby Tiara Revinda, Sri Ayulita, Fenti, Sillaturahmi, Ovie Asri, Andry Yusuf, Ade Novellino, Adly, Al rahim, Don harossy, Gemi aidil Saputra, Ardi, Anisa Nabilla** dan adik-adik lainnya yang tak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas support, dukungan, doa, dan atas hadirnya aneka

bentuk cinta dari kalian yang Allah hadirkan sebagai pemberi dukungan dan pembangkit semangat.

Teruntuk **Tasya Dwitami Zandra** yang sudah dianggap seperti adik sendiri terima kasih atas semua dukungan, bantuan yang sudah dikorbankan, slalu mendampingi suka duka, udah mau ikut berjuang slama penulisan skripsi, Semoga untuk kedepannya Tasya sukses, bg yakin samo cha dan sangat yakin pasti cha bisa untuak wisudah sabalum empat tahun, slalu berjuang ya jangan mudah menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit. Letakkan bayangan toga didepan mata, target 5 Cm itu pasti akan diraih, Semoga SH nya juga cepat nyusul dan juga bisa wisudah tahun ini dengan nilai yang terbaik.

Teruntuk **Dwika Rahmawari** yang sudah dianggap seperti adik sendiri tapi sering di panggil adik ipar, hahahahhaa... terima kasih atas dukungan, bantuan yang sudah dikorbankan, yang udah mau ikut berjuang juga selama penulisan skripsi ini, yang disuruh buat power point juga, semoga wika cepat nyusul juga gelar SE nya, walaupun sudah kuliah tapi masih kelihatan kayak anak SMA 😊. slalu berjuang ya, Tetap semangat, jangan mudah menyerah apapun yang terjadi tetaplah melangkah meski itu sulit. Tetap selalu jadi adik ipar yaa, walaupun entah kapan sama kakaknya. 😊 wkwkwkwk

Buat **Khairani Fitri** terima kasih untuk semuanya yang pernah tercurah untukku, terima kasih atas semua dukungan, doa yang terbaik, bantuan yang sudah dikorbankan selama perkuliahan, yang pernah mendampingi dalam suka dan duka, yang selalu menyemangati, yang sering ngomel-ngomel kalau sudah membahas skripsi yang ocehan dan ceramahnya berjam-jam, tapi selalu diabaikan. 😊 wkwkwkwkwk, semoga untuk kedepannya any sukses yaa, buat bangga kedua orang tua karna kedua orang tua sudah menaruh harapan yang besar terhadap dirimu, tetap semangat selalu berjuang ya, jangan mudah menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah walaupun itu sulit dan banyak rintangan, semoga cepat terkejar target untuk cepat wisudah. Amiin ya robbal 'alamiin

Teruntuk **Fenti Sepri Ismalinda** dan **Aprilia Wulandari** yang sudah seperti adik sendiri, terima kasih atas semua dukungan, bantuan yang sudah kalian korbankan, dan doa yang kalian berikan, walaupun candaan kita melewati batasnya, 😊 tapi itu semua tidak memudarkan rasa kekeluargaan kita, beruntung punya adik seperti kalian, kalian adalah obat pelipur lara hati yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh, special doa untuk kalian semoga untuk kedepannya kalian sukses, semoga cepat terkejar target kalian untuk cepat wisudah, buat bangga kedua orang tuanya, sedih itu bukan ketika kita saling berbagi, namun sekarang harus ada yang pergi, pergi untuk menata kehidupan untuk kedepannya, karna setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan, yaa begitulah kehidupan, slalu berjuang ya jangan mudah menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit.

Rekan-rekan pengurus HMPS Ekonomi Syariah periode 2014 yang telah bersama-sama berjuang, terimakasih atas masukan, arahan serta kritikan sehingga saya bisa seperti ini. Tak lupa kepada sahabat magang yang magang di Kabupaten Tanah Datar. Abang-abang dan kawan-kawan **DMC Kota Budaya** yang selalu memberikan masukan, bimbingan, arahan, nasehat sehingga bisa seperti ini.

Terima kasih juga kepada Sahabat KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang sudah menjadi keluarga keduaku (One big Family) **Mutiara Suci Ramadhani, Cica Nofri Rahayu, Renil**

Fortunateli, Suci Afidri, Ririn, Vita, Chery (Upin), Deni (Ipin) susah dan senang kita lalu bersama-sama selama 40 hari teman, dan tak lupa kepada keluarga di Jorong Kampung baru, Nagari Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota yang dengan senang hati mau menerima kami dan slalu membantu kami.

Terima kasih untuk para sahabatku dari SMA yang satu persatu sudah menyelesaikan perkuliahannya terlebi dahulu. Terimah kasih untuk teman-teman yang lain Indah Dwi Putri, Novi Suramika, Surya Lestari, Widya Ningsih, Rini Agustina, Risha Ramadhani atas bantuan, dukungan, semangat dan doa selama dalam penulisan skripsi. Semoga kalian semua juga cepat nyusul atas gelar sarjananya.

Kalian semua bukan hanya menjadi teman dan kakak, adik yang baik, kalian adalah saudara bagiku!!

"Never you say give up, do what you can do. everything must have its course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want. Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will be called a success".

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. Never give up! Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan skripsi semoga cepat menyusul. Semoga kita adalah orang yang sukses nantinya ☺

Mb : Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas nama-nama rekan yang tak tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa mengalir membasahi lisan ini ☺ Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, amin Ya Rabbalalamin



Salam penulis,
IFRI MAIDI SAPUTRA, SE

ABSTRAK

Nama **Ifri Maldi Saputra**, NIM **12 231 037**, judul Skripsi “**Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar**”, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Datar sangat efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Pada tahun 2009 sebesar 112,41%, tahun 2010 sebesar 119,87%, tahun 2011 sebesar 118,33% tergolong sangat efektif, tahun 2012 sebesar 75,67%, tahun 2013 sebesar 79,89% tergolong kurang efektif, pada tahun 2014 sebesar 105,17%, pada tahun 2015 sebesar 103,70% tergolong sangat efektif, dan tahun 2016 sebesar 99,93% tergolong cukup efektif. Rasio efektivitasnya rata-rata tinggi dan menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2009 sampai tahun 2016 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya pada retribusi pelayanan pasar kurang dari 2%.

Kata Kunci: *Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi, Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “***Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar***”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Rarulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pusaka (Al-quran dan Hadits) sebagai pedoman kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ibunda tersayang MARLIS dan Ayahanda tercinta MAIZAR dan kedua adik Aldi Rianto dan Sherly Anike Putri, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, motivasi, semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Gampito, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.

4. Ibuk Sri Adella Fitri, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Husni Sabri, M.Si selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Khairulis Shobirin, SE., M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan pengetahuan dan arahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di IAIN Batusangkar.
9. Semua pegawai Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanah Datar khususnya Bapak Azwardi dan Ibuk Anike Deswira, SE yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengambil data dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
10. Semua pegawai Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar khususnya Bapak Abi Hanifah, SE yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengambil data dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah angkatan 2012 khususnya buat lokal A beserta teman-teman lokal B yang saling mendukung dan membantu selesainya skripsi ini, Senior dan adik-adik Jurusan Ekonomi Syariah yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan, suport dan motivasi untuk tetap semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril dan materil diterima dan di balas oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan pemerhati serta

menjadi amal shaleh bagi penulis hendaknya, Amin. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, Februari 2017

IFRI MAIDI SAPUTRA
NIM. 12 231 037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah..... 9

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah 11

1. Pengertian Otonomi Daerah..... 11

2. Tujuan Otonomi Daerah..... 13

3. Prinsip Otonomi Daerah..... 15

4. Penetapan Pelaksanaan Otonomi Daerah..... 16

5. Pembagian Kekuasaan Dalam Kerangka Otonomi Daerah ... 17

B. Pendapatan Asli Daerah..... 19

C.	Retribusi Daerah	25
1.	Pengertian Retribusi Daerah	25
2.	Objek Retribusi Daerah	25
3.	Golongan Retribusi Daerah	26
4.	Subjek Retribusi Daerah	28
5.	Penghitungan Retribusi	28
6.	Cara Perhitungan Retribusi	29
D.	Retribusi Pelayanan Pasar	29
1.	Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar	29
2.	Objek dan Subjek Retribusi	30
3.	Struktur dan Besar Tarif	30
4.	Tata Cara Pemungutan Retribusi	32
E.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	32
1.	Efektivitas	32
2.	Kontribusi	33
F.	Penelitian yang Relevan	35
G.	Defenisi Operasional	38
H.	Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	41
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	41
C.	Metode Penelitian	41
D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Teknik Analisis Data	43
1.	Analisis Efektivitas	43
2.	Analisis Kontribusi	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar	47
2. Sejarah berdirinya DPPKAD Kabupaten Tanah Datar	49
B. Analisis Deskriptif Data	60
C. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	64
D. Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009-2016.....	4
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009-2016.....	7
2.1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah.....	33
2.2 Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi terhadap Pendaptan Asli Daerah..	34
4.1 Daftar Nama-nama Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Datar.....	61
4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2009-2016.....	66
4.3 Kontribusi Retribusi Pelayanan Psar terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.....	73

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Hal
1. Kerangka Berpikir.....	40
2. Stuktur Organisasi.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari KESBANGPOL
3. Surat Balasan Penelitian dari DPPKA / BKD (Badan Keuangan Daerah)
4. Surat Balasan Penelitian dari Koperindagpastam/ Koperindag (Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan)
5. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009
6. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010
7. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011
8. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012
9. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
10. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014
11. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
12. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016
13. Daftar Pasar Tradisional Kabupaten Tanah Datar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.¹

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.²

¹Kuncoro, *Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*, (yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2010), hal: 4

²Dharma Setywan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Cet. Ke-2, hal. 205 - 209

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek keuangan daerah. Suatu daerah dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah dapat membiayai semua kebutuhannya dengan sumber keuangan yang dimilikinya. Semakin tinggi sumber keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan daerah maka akan membuat daerah tersebut mandiri dan memiliki ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat. Namun sebaliknya, suatu daerah dikatakan gagal apabila pemerintah daerah tidak dapat membiayai semua atau sebagian kebutuhannya dengan sumber keuangan yang dimilikinya, hal ini mengakibatkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar pemerintah daerah dan berpotensi memberikan kontribusi bagi keuangan daerah.

Keuangan pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dioptimalkan. Tuntutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah dan semakin besarnya kebutuhan daerah yang dibiayai menggunakan keuangan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari potensi daerah dan kebijakan pemerintah

daerah dalam mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta strategi kepala daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perarutan perundang-undangan yang berlaku. Unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar adalah pajak daerah selain unsur-unsur lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.³ Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipaksakan kepada setiap lapisan masyarakat.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009-2016 adalah sebagai berikut:

³Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), hal. 302

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Tanah Datar
Tahun 2009–2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2009	31.549.773.047,00	33.373.944.244,00	105,78
2010	40.402.394.288,00	43.061.751.381,00	106,58
2011	51.823.186.687,33	60.100.782.252,00	115,97
2012	53.029.663.933,00	60.004.818.401,88	113,15
2013	63.106.402.076,46	62.198.420.469,28	98,56
2014	97.329.727.272,00	99.750.501.841,69	102,48
2015	104.674.778.235,00	112.072.726.547,89	107,06
2016	117.484.614.929,00	113.058.354.710,00	96,23

Sumber data: DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Paparan pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar rata-rata setiap tahunnya telah melampaui target yang ditetapkan, namun pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan ketidaktercapaian target yang diharapkan, terlihat jelas pada tahun 2013 target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 63.106.402.076,46 tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 62.198.420.469,28. Begitu juga pada tahun 2016 target yang diharapkan sebesar Rp. 117.484.614.929,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 113.058.354.710,00. Hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dianggarkan namun tidak terealisasi penerimaannya dengan baik sehingga belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013 dan 2016.

Begitu juga dengan pencapaian yang di peroleh setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga penurunan seperti pada tahun 2009

pencapaiannya yaitu sebesar 105,78%, pada tahun 2010 pencapaiannya yaitu sebesar 106,58% mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 pencapaiannya yaitu sebesar 115,97% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2012 pencapaiannya mengalami penurunan yaitu sebesar 113,15%. Dan di tahun 2013 pencapaiannya kembali mengalami penurunan sebesar 98,56% dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan pencapaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 102,48% begitu juga pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 107,06%. Namun pada tahun 2016 pencapaiannya mengalami penurunan sebesar 96,23%. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan yaitu adanya peningkatan dan penurunan.

Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.⁴

⁴Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*: Ed. Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 64-66

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pelayanan pasar ini dengan sebaik-baiknya. Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.⁵

Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 Kecamatan dimana setiap Kecamatan memiliki pasar, di antara pasar-pasar tersebut terdapat satu pasar yang dijadikan sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Tanah Datar yaitu pasar Batusangkar yang setiap harinya terdapat transaksi jual beli. Pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar dikelola oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAGPASTAM).

Penerimaan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009-2016 adalah sebagai berikut:

⁵Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 437-440

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009–2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	327.977.000,00	368.687.060,00
2010	375.000.000,00	449.535.190,00
2011	379.716.500,00	449.344.450,00
2012	626.340.000,00	473.999.530,00
2013	689.740.400,00	551.042.760,00
2014	704.196.400,00	740.669.240,00
2015	657.814.400,00	682.207.390,00
2016	679.340.400,00	678.879.930,00

Sumber: DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Paparan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009-2011 telah melampaui target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2012-2013 menunjukkan ketidaktercapaian target yang diharapkan, dan pada tahun 2014-2015 telah melampaui target yang diharapkan sedangkan pada tahun 2016 penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak tercapainya target yang diharapkan.

Wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Abi Hanifah, SE selaku Kasi Pelayanan dan Jasa di Bidang Pasar pada dinas KOPERINDAGPASTAM pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 mengatakan bahwasanya setiap hari para pedagang yang berjualan diberi karcis retribusi oleh petugas, baik itu pasar Batusangkar maupun pasar-pasar yang terdapat di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, namun masih ada terdapat kasus para pedagang enggan untuk membayar karcis retribusi tersebut. Dan masih ada juga para pedagang yang berjualan disembarangan tempat, bahkan terkadang barang dagangannya sudah habis

terjual sebelum petugas meminta retribusi, dilihat dari potensi yang ada, Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak pasar sehingga akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap penerimaan retribusi daerah melalui retribusi pelayanan pasar, namun pada kenyataannya pemerintah daerah dalam pengelolaan masih terfokus pada pasar Batusangkar dibandingkan dengan pasar yang lain, pemerintah daerah hanya melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar yang ada di berbagai Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar pada pasar-pasar yang ada di berbagai Kecamatan masih belum maksimal. Sehingga pendapatan daerah melalui retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar masih kurang optimal.⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu komponen Retribusi Daerah yang memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan.
2. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.
3. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

⁶ Wawancara dengan Bapak Abi Hanifah, SE selaku Kasi Pelayanan dan Jasa di Bidang Pasar pada dinas Koperindagpastam pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. ?
2. Bagaimanakah kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. ?

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2016
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2016

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

- b. Meningkatkan pengetahuan penulis untuk menambah wawasan berfikir dan memperluas pengetahuan, baik secara teori maupun praktek.
- 2. Bagi Akademik
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
 - b. Untuk menambah bahan bacaan Akademik IAIN Batusangkar
 - 3. Bagi Dinas/ Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Berdasarkan pada efektivitas kinerja Pemerintah Daerah baik dilihat dari segi ketercapaiannya pada kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah merupakan salah satu tuntutan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik.⁷

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Namun dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

⁷Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 5

⁸Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta:Erlangga,2006), hal. 338

⁹Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah

otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang ini dalam pelaksanaan asas desentralisasi, wilayah negara RI dibagi dalam susunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Konsep Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan dengan Undang-undang ini, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi Daerah Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah otonom terdapat beberapa unsur-unsur yaitu diantaranya.¹⁰

a. Unsur elemen batas wilayah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum. Misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Disisi lain batas wilayah juga sangat penting apabila terjadi sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah.

¹⁰ Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garafika Offset, 2006). hal 6-7

b. Unsur elemen pemerintahan

Eksistensi Pemerintah Daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan Daerah juga meliputi Pemerintahan Daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. Unsur masyarakat

Masyarakat sebagai elemen Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun *gesselschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai system pemerintahan daerah mulai dari bentuk, cara berfikir, bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Proses peralihan dari system dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut Pemerintah Daerah dengan Otonomi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹¹

2. Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini tidak

¹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah

kalah pentingnya tujuan dari Otonomi Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya NKRI dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara.¹²

Agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervisi, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu juga diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bersama itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan Otonomi secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan baik dan tidak adanya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah dengan swakarsa sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan terlindungnya dari segala gngguan dan tercipta rasa aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Salah satu aspek penting otonomi daerah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada publik.¹⁴ Hal ini berarti dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyusunan kegiatan yang akan mereka jalankan dan semuanya dituangkan dalam bentuk Anggaran

¹²Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan.....*, hal 8-9

¹³Undang-Undang Otonomi Daerah edisi 2011 (Bandung:fokusmedia), hal 149

¹⁴Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi.....*, hal. 58

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didalam APBD terdapat keseluruhan program-program yang akan dilakukan oleh daerah dalam satu tahun periode.¹⁵

3. Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sentanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 1 ayat 7 bahwasanya Asas Otonomi berdasarkan dengan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hal 2-3

¹⁶Undang-Undang Otonomi Daerah edisi 2011...., hal 148

¹⁷Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dalam penyelenggaraannya harus meningkatkan pelayanan, sebagai dasar yang menjadi pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan dan harapan serta aspirasi yang timbul dari masyarakat yang merupakan bagian utama dalam tujuan Nasional.

4. Penetapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Secara kualitatif pelaksanaan Otonomi Daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
- 2) Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.
- 3) Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
- 4) Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi professional.
- 5) Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sangat didambakan oleh masyarakat.
- 6) Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- 7) Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan labih baik.
- 8) Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi factor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan Otonomi Daerah adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemitraan antar pemerintah Kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kabupaten.
- 2) Penataan kelembagaan dan sinkronisasi harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait.
- 5) Peningkatan koordinasi dengan pusat dan propinsi serta kerja sama antar daerah.

5. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam UU tersebut.

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah, dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,

keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Di samping itu otonomi seluas-luasnya (keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

Daerah otonom propinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani Propinsi/Gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup:

- a. Kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.
- b. Kewenangan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang propinsi.
- c. Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.

- d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dan pernyataan dari Daerah Otonom Kabupaten atau Kota tersebut.¹⁸

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.¹⁹

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.²⁰

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²¹

Menurut Ahmad Yani Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

¹⁸Komaruddin Hidayat, dkk. "Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani", (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal.192-193

¹⁹ Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Edisi Terbaru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta:Lampiran dan Format Laporan, hal. 266

²⁰Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.

²¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*: Ed. Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 44

sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :²³

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Kesit, Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.²⁴ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak

²² Ahmad Yani,SH.,MM, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.39

²³ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), hal. 302

²⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: UII Press, 2010), hal.

rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁵

Menurut Sommerfeld dan Ray dalam bukunya Thomas Sumarsan, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁶

Menurut Siahaan pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.²⁷

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, antara lain:²⁸

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara. Karena pemungutan pajak harus sampai pada negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara.

²⁵Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 1

²⁶Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal. 4

²⁷Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 5

²⁸Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak...*, hal. 5-8

5. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (*public saving*).
6. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹ Menurut Kesit, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.³⁰

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, yaitu:³¹

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi di dalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

²⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 12

³⁰Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi....*, hal. 1-2

³¹Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 43

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:³²

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah.³³ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁴

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika terhadap pengelolaan tersebut mendapatkan laba, maka laba dapat dimasukkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:³⁵

¹⁸ Pardiati, *Akuntansi Pajak*: Edisi Keempat, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 178

³³ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 5

³⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2009) hal. 73

³⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan...*, hal 73

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.³⁶

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran, maka setiap penyelenggaraan harus melakukan norma-norma sebagai berikut:³⁷

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan
2. Membebaskan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Menjunjung tinggi ketertiban informasi/transparansi
4. Memenuhi asas akuntabilitas
5. Menghormati demokrasi

Pemerintahan yang baik tercermin dari adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

³⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan...*, hal 74

³⁷ Abdul Halim, *Akuntansi dan...*, hal. 302

C. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dll.³⁸

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.³⁹ Menurut Marihot Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁰

2. Objek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena ada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

³⁸ Siti Resmi, *Perpajakan....*, hal. 2

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

⁴⁰ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah....*, hal. 432

- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴¹

3. Golongan Retribusi Daerah

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis–jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari sebagai berikut:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat.
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa usaha yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

⁴¹Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 434-435

dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. Jenis-jenis Jasa Usaha terdiri dari sebagai berikut:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan.
 - d) Retribusi Terminal.
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g) Retribusi Penyedotan Kakus.
 - h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - i) Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal.
 - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari sebagai berikut:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol.
 - c) Retribusi Izin Gangguan.
 - d) Retribusi Izin Trayek.
 - e) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.⁴²

⁴²Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 435-447

4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
- b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
- c) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.⁴³

5. Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa kali/jam parkir kendaraan, dan sebagainya.

⁴³Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 440-447

2) Tarif retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya embedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dll.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.⁴⁴

6. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut:⁴⁵

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

D. Retribusi Pelayanan Pasar

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁴⁶ Menurut Marihot Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.⁴⁷

⁴⁴Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 448-449

⁴⁵Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah...*, hal. 451

⁴⁶Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1

⁴⁷Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah.....*, hal. 437-440

2. Objek dan Subjek Retribusi

a. Objek Retribusi

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan pasar tempat untuk berjualan dan berdagang yang disediakan, dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar sebagai mana yang dimaksud adalah pelayanan persediaan fasilitas pasar yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

b. Subjek Retribusi

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang digunakan.

3. Struktur dan Besarnya Tarif.⁴⁹

No	Golongan	Kelas	Satuan
I.	Golongan I Los/Kios 1. Pasar Baru Atas	Klas I	Rp. 113.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 90.000,-/bulan/unit
		Klas III	Rp. 68.000,-/bulan/unit
		Klas IV	Rp. 45.000,-/bulan/unit
	2. Pasar Inpres I	Klas I	Rp. 90.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 75.000,-/bulan/unit
		Klas III	Rp. 40.000,-/bulan/unit
	3. Kios Pasar Inpres II	Klas I	Rp. 75.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 60.000,-/bulan/unit

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 28 dan 29

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 31

		Klas III	Rp. 45.000,-/bulan/unit
		Klas IV	Rp. 38.000,-/bulan/unit
	4. Kios Pasar Inpres III	Klas I	Rp. 90.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 75.000,-/bulan/unit
	5. Kios Jati (Terminal)		Rp. 40.000,-/bulan/unit
	6. Kios Mini	Klas I	Rp. 90.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 68.000,-/bulan/unit
	7. Los Ikan		Rp. 40.000,-/bulan/unit
	8. Los Daging	Klas I	Rp. 110.000,-/bulan/unit
		Klas II	Rp. 83.000,-/bulan/unit
		Klas III	Rp. 60.000,-/bulan/unit
		Klas IV	Rp. 40.000,-/bulan/unit
II	Golongan II Pelataran, los kios lepas	1. Pelataran 2. Los/kios lepas	Rp. 1.000,-/m /hari Rp. 2.000,-/m /hari
III	Golongan III, Pasar ternak	1. Sapi, Kerbau, Kuda 2. Kambing, Domba	Rp. 10.000,-/ekor/hari Rp. 2.000,-/ekor/hari
IV	WC Umum	1. Buang air kecil 2. Buang air besar	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
V	Balik nama hak sewa los kios, dikenakan retribusi jasa balik nama hak sewa sebesar 10 (sepuluh) x sewa erbulannya		
VI	Apabila pihak kedua (penyewa) menyewakan los/kios kepada pihak ketiga, dikenakan retribusi jasa penyewaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak pertahun		

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- 3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.⁵⁰

E. Analisis Efektivitas dan Kontribusi

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditargetkan, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.⁵¹

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁵²

⁵⁰Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 59

⁵¹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016) hal. 141

⁵²Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013) hal. 182

Tingkat Efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁵³

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1
Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah⁵⁴

>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi

Bedasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa apabila efektivitas yang dihasilkan melebihi 100% dinyatakan sangat efektif, dan jika 100% dinyatakan efektif, dibawah 100% batas maksimal 90% dinyatakan cukup efektif, selanjutnya jika 89%-75% dinyatakan kurang efektif, dan kurang dari 75 % berarti tidak efektif.

2. Kontribusi

Kontribusi adalah sejauh mana peranan untuk mencapai tujuan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap PAD, begitu

⁵³Mardiasmo: *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2007), hal. 129

⁵⁴ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*, hal. 141

pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil.⁵⁵

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penerimaan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai Berikut :⁵⁶

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.2
Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi terhadap PAD

Persentase	Skala Kontribusi
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10,10 - 20 %	Kurang
20,10 - 30 %	Sedang
30,10 - 40 %	Cukup Baik
40,10 -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sember: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Tingkat kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong atas 6 golongan, diantaranya:

- a. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 0,00-10% berarti kontribusinya tergolong sangat kurang.
- b. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 10,10-20% berarti kontribusinya tergolong kurang.
- c. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar jalan terhadap PAD antara 20,10-30% berarti kontribusinya tergolong sedang.

⁵⁵Mahmudi, *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 151

⁵⁶Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hal. 153

- d. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 30,10-40% berarti kontribusinya tergolong cukup baik.
- e. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 40,10-50% berarti kontribusinya tergolong baik.
- f. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD di atas 50% berarti kontribusinya tergolong sangat baik.⁵⁷

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Habibi Rahman pada tahun 2011 Universitas Hasanuddin dengan judul Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kab. Enrekang. Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun anggaran ini, antara target dan realisasi anggaran tiap tahunnya dari penerimaan retribusi pasar belum menampakan target maksimal yang ditetapkan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Enrekang, Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁵⁷Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan retribusi seperti kurang akuratnya data yang sebenarnya tentang potensi yang dimiliki Pasar Baraka, kedisiplinan para kolektor/pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya, sistem penggajian para kolektor yang sering terlambat dan pengawasan yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per bulan saja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Hamzah pada tahun 2015 Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem *official assesment*, yaitu pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arjangga Wisnu Raga pada tahun 2011 Universitas Diponegoro dengan judul Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009. Retribusi pasar merupakan salah satu macam sumber penerimaan Daerah yang penting bagi Kabupaten Demak. Hal ini terbukti selama tahun anggaran 2006-2009 realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan.

Namun pada pencapaian targetnya pada tahun 2006 dan 2007 tidak terpenuhi (dimana realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target), yaitu sebesar (-4,83%) dan (-1,14%). Hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan di dalam kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar, menganalisis kinerja penerimaan retribusi pasar, dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (pedagang, petugas pemungut retribusi pasar, dan petugas pengelola pasar Kabupaten Demak) dengan jumlah 50 orang. Dari perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pada tahun 2006-2009 diperoleh gambaran bahwa rata-rata kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak tidak efektif (0,59%) tetapi efisien (0,05%).

Dari analisis matriks SWOT diperoleh empat strategi yaitu, strategi SO adalah memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada. Strategi ST adalah memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan bila perlu menghilangkan ancaman yang akan dihadapi. Strategi WO adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Strategi WT yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang. Kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak memiliki skor total rata-rata tertimbang IFE 2,52 artinya posisi internal DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Demak memiliki posisi rata-rata terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada, sedangkan skor total rata-rata tertimbang EFE sebesar 2,49 yang menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman yaitu

memiliki posisi yang sedang. Oleh karena itu, strategi yang cocok digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penelitian Habibi Rahman tentang pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kabupaten Enrekang sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, di sini terdapat perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan, penulis meneliti tentang efektivitas dan kontribusi, selain itu terdapat perbedaan tempat penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penelitian Nurlia Hamzah tentang Analisis kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, di sini terdapat perbedaan tempat penelitian dan metode penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penelitian Arjangga Wisnu Raga tentang Analisis kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, di sini terdapat perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang kinerja penerimaan, penulis meneliti tentang efektivitas dan kontribusi, selain itu terdapat perbedaan tempat penelitian.

G. Defenisi Operasional

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” artinya berhasil/ ditaati/ dengan hasil baik.⁵⁸ Dalam Bahasa Indonesia Efektivitas diartikan hasil/ membawa hasil.⁵⁹ Efektivitas adalah kemampuan pemerintah

⁵⁸John M. Echols and Hasan Sahdily, *Kamus Inggris Indonesia Cetakan XXIII*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Usaha, 1996), hal. 145

⁵⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 806

daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan.⁶⁰ Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*contribution*” artinya sumbangan/ iuran/ memberikan sumbangan.⁶¹ Dalam Bahasa Indonesia kontribusi diartikan dengan iuran/ sumbangan.⁶² Kontribusi adalah sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari potensi yang ada pada daerah dan di kelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶⁴ Retribusi daerahnya yaitu retribusi pelayanan pasar.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mengkaji tentang keberhasilan dan sumbangan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya retribusi pelayanan pasar.

H. Kerangka Berpikir

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan retribusi pelayanan pasar.

⁶⁰Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, hal. 182

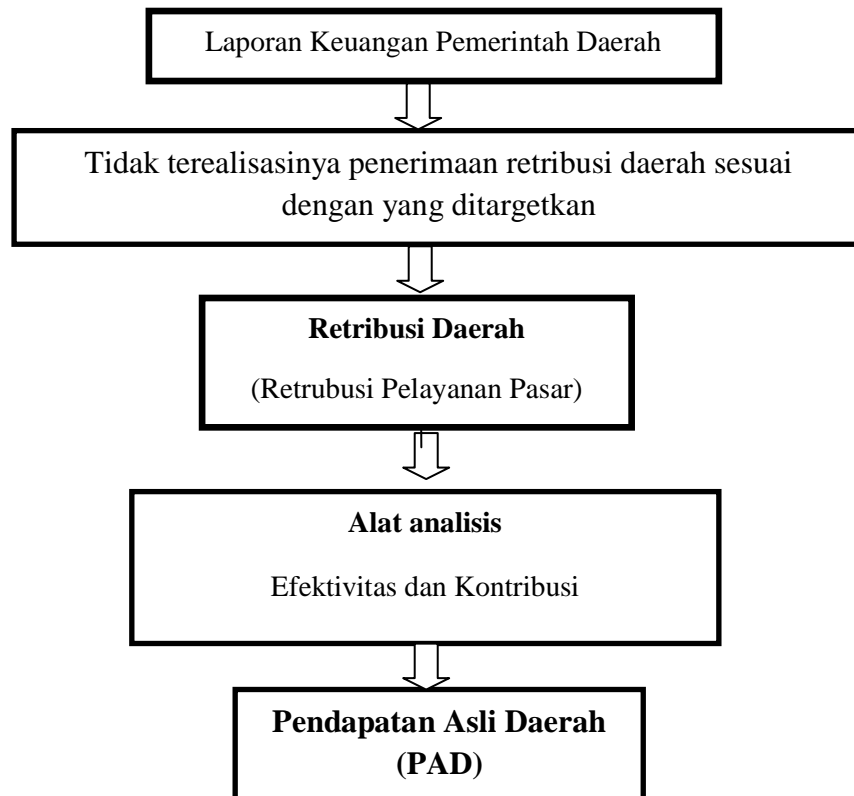
⁶¹John M. Echols and Hasan Sahdily, *Kamus Inggris Indonesia.....*, hal. 145

⁶²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia....*, hal. 806

⁶³Mahmudi, *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah....*, hal. 151

⁶⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2009) hal. 73

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa langkah awal penelitian dengan melihat laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar spesifikasi laporan target dan realisasi pendapatan daerah dilihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar yang merupakan bagian dari Retribusi Daerah yang mengalami naik turun, yang di ukur dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis Efektivitas dan Kontribusi. Sehingga dengan menggunakan dua alat analisis diatas kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sejauh mana besarnya kontribusi yang dihasilkan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.⁶⁵ Metode ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2016.

B. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017 yang bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar.

C. Metode Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dari Bapak Azwardi sebagai Kepala Seksi Datalegalitas Pengkajin di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan Bapak Abi Hanifah, SE sebagai Kasi Pelayanan dan Jasa di Dinas Koperasi, Perindustrian,

⁶⁵A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 62

Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAGPASTAM) Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009-2016, data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (PAD) tahun 2009-2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi Pelayanan Pasar, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanah Datar .

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau meminta informasi secara langsung tentang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber Pajak Daerah, Retribusi Daerah terkhusus Retribusi Pelayanan Pasar dengan Bapak Azwardi sebagai Kepala Seksi Datalegalitas Pengkajin di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bapak Abi Hanifah, SE sebagai Kasi Pelayanan dan Jasa di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAGPASTAM) Kabupaten Tanah Datar sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti Laporan Realisasi Anggaran Tahun

2009-2016, data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2009-2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi Pelayanan Pasar.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditargetkan, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.⁶⁶

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁶⁷

Tingkat Efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁶⁸

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

⁶⁶Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016), hal. 141

⁶⁷Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2013), hal. 182

⁶⁸Mardiasmo: *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2007), hal. 129

Tabel 2.1
Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah⁶⁹

>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi

Bedasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa apabila efektifitas yang dihasilkan melebihi 100% dinyatakan sangat efektif, dan jika 100% dinyatakan efektif, di bawah 100% batas maksimal 90% dinyatakan cukup efektif, selanjutnya jika 89%-75% dinyatakan kurang efektif, dan kurang dari 75 % berarti tidak efektif.

Tingkat efektivitas retribusi daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas retribusi daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka retribusi daerah semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah sejauh mana peranan untuk mencapai tujuan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil

⁶⁹Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah....*, hal. 141

perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil.⁷⁰

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penerimaan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai Berikut:⁷¹

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.2
Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi terhadap PAD

Persentase	Skala Kontribusi
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10,10 - 20 %	Kurang
20,10 - 30 %	Sedang
30,10 - 40 %	Cukup Baik
40,10 -50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Tingkat kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong atas 6 golongan, diantaranya:

- g. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 0,00-10% berarti kontribusinya tergolong sangat kurang.
- h. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 10,10-20% berarti kontribusinya tergolong kurang.
- i. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar jalan terhadap PAD antara 20,10-30% berarti kontribusinya tergolong sedang.

⁷⁰Mahmudi, *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hal. 151

⁷¹Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....*, hal. 153

- j. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 30,10-40% berarti kontribusinya tergolong cukup baik.
- k. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD antara 40,10-50% berarti kontribusinya tergolong baik.
- l. Hasil persentase penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD di atas 50% berarti kontribusinya tergolong sangat baik.⁷²

Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah khususnya Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan dengan semakin tingginya kontribusi retribusi daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis kontribusi ini membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari analisis ini maka akan diketahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

⁷²Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³ Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan mengenai Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sedangkan ayat 4 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu Kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership

⁷³Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah

dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah.

a. Visi Kabupaten Tanah Datar

Pada Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan semua aktivitas terkait dengan sistem pemerintahannya setiap pemerintahan mestinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan dibuktikannya dalam suatu visi untuk memperkuat tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar juga memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitunya:

"Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"

b. Misi Kabupaten Tanah Datar

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintahan itu sendiri, Pemerintah Daerah menentakansuatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya.

Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- 2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.

- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 5) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
 - a) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
 - b) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

2. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

a. Sejarah DPPKA

Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Salah satu tujuan pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan penataan

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan asset dikelola dengan baik.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai berikut: *“Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”*.

2) Fungsi

Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 ditetapkan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugas dibidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan asset daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

1) Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Visi DPPKA Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu *“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Manajemen Yang Baik.”*

Terwujudnya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset yang prima melalui manajemen yang baik merupakan bagian dari Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar pada perspektif costume. Visi pada perspektif kostumer tersebut akan tercapai melalui manajemen efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2) Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dimasa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang Rasional, Transparan, Partisipatif dan bertanggungjawab.
- b) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- c) Meningkatkan kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.

d. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar

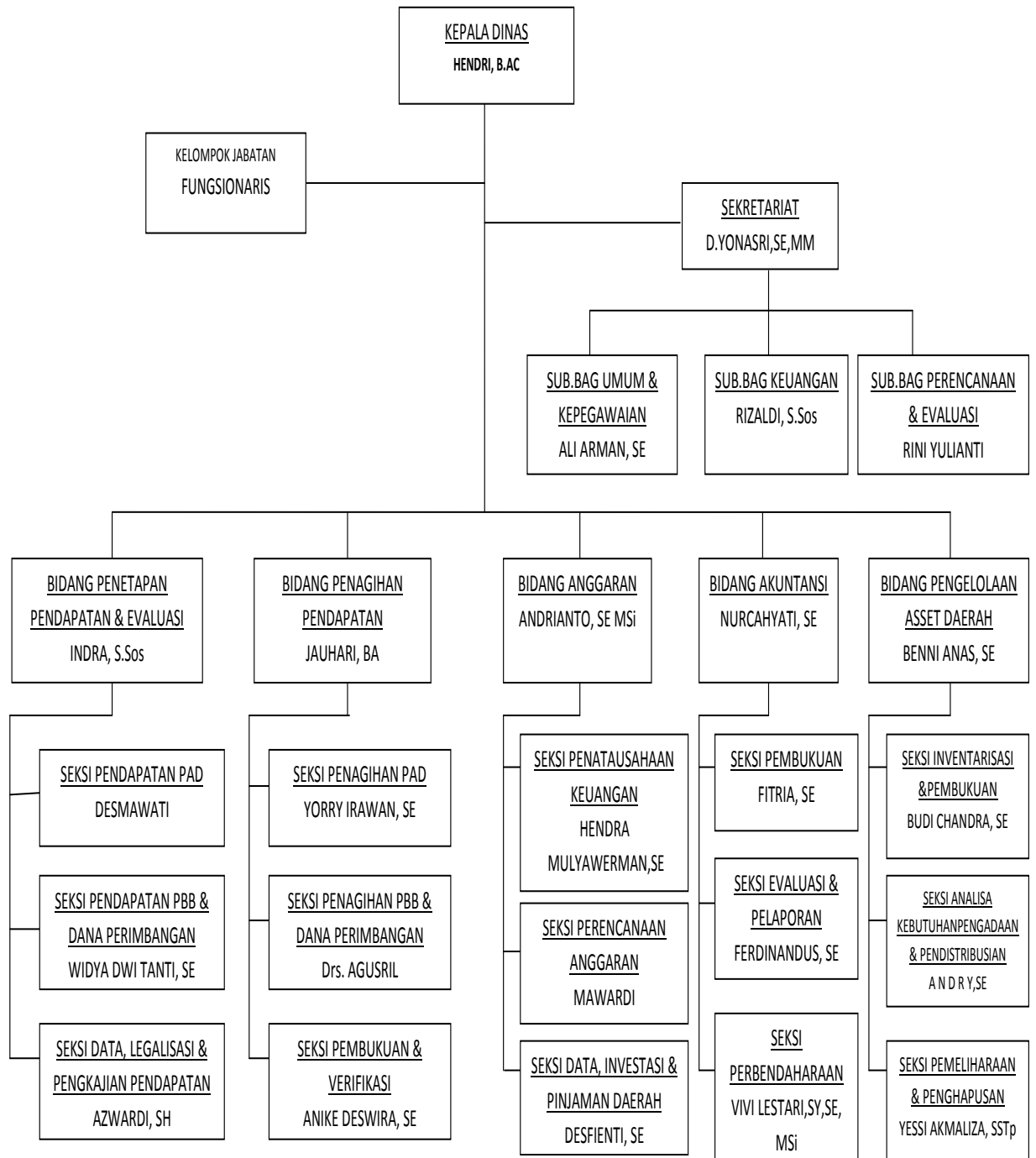
1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, unsur Staf yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Struktur organisasi adalah kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas pokok kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kerangka kerja pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Tanah Datar



2) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai mana dimaksud dalam PerdaNo. 9 Tahun 2010 pasal 2 sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, Terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
 2. Seksi Pendataan Pajak Bumi
 3. Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan
- d) Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari:
 1. Seksi Penagihan Pendapatan Asli daerah
 2. Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan
 3. Seksi Pembukuan dan verifikasi
- e) Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Bidang Penatausahaan Keuangan
 2. Seksi Perencanaa Anggaran
 3. Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah
- f) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembukuan
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 3. Seksi Perbendaharaan
- g) Bidang Pengelolaan Asset daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan

2. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kegiatan Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
- c) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang pengolahan keuangan yaitu bidang Akuntansi, bidang anggaran dan bidang aset.
- d) Penyelenggaraan bidang administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- e) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan Perundang-Undangan.
- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
- e) Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan berdasarkan asas keseimbangan, dan
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

3) Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendataan dan evaluasi. Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan

koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah.
 - f) Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah.
 - g) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
 - h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
 - i) Mencari, menghimpun dan mengelola objek wajib pajak daerah
 - j) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah.
- 4) Bidang Penagihan Pendapatan membawahi:
- a) Seksi penagihan pendapatan asli daerah
 - b) Seksi penagihan PBB dan dan perimbangan
 - c) Seksi pembukuan dan Verifikasi

Bidang penagihan pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutandan program sesuai ruang lingkup penagihan pendapatan, kepada

bidang penagihan pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah
 - b) Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah
 - c) Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah
 - d) Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah
 - e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah kepada petugas kolektor.
- 5) Bidang Anggaran membawahi:
- a) Seksi penatausahaan keuangan
 - b) Seksi perencanaan anggaran
 - c) Seksi data, investasi dan pinjaman daerah

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
 - b) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
 - c) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan
 - d) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan.
- 6) Bidang Akuntansi
- Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a) Sub bidang pembukuan
- b) Sub bidang pembendaharaan
- c) Seksi evaluasi dan pelaporan

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
 - b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
 - c) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
 - d) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan
- 7) Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Bidang pengelolaan asset daerah terdiri dari:

- a) Seksi inventarisasi dan pembukuan
- b) Seksi pemeliharaan dan penghapusan
- c) Seksi analisa kebutuhan pengadaan dan pendistribusian.

Bidang pengelolaan asset daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

B. Analisis Deskriptif Data

Kabupaten Tanah Datar melakukan pemungutan terhadap beberapa jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi

daerah, diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar.⁷⁴ Dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.⁷⁵

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan pasar tempat untuk berjualan dan berdagang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar sedangkan wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang digunakan.

Berikut ini adalah data Pasar Tradisional yang dikelola dan diawasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAGPASTAM) Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.1
Daftar Nama-nama Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Pasar	Alamat	Kondisi Pasar	Hari Buka Pasar
1	Pasar Raba'a	Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto	Sedang	2 Kali (Rabu dan Sabtu)
2	Pasar Koto Baru	Nagari Koto baru Kecamatan X Koto	Sedang/ Baik	2 Kali (Senin dan Selasa)
3	Pasar Baruah	Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto	Sedang	2 Kali (Minggu

⁷⁴Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

⁷⁵Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

				dan Kamis)
4	Pasar Pitah Bunga	Nagari Pitalah Kec. Batipuh	Sedang	1 Kali (Minggu)
5	Pasar Kubu Kerambia	Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh	Kurang	1 Kali (Selasa)
6	Pasar Ladang Laweh	Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh	Kurang	1 Kali (Rabu)
7	Pasar Balai Gadang	Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh	Kurang	1 Kali (Kamis)
8	Pasar Balai Kamis	Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh	Sedang	1 Kali (Kamis)
9	Pasar Malalo	Nagari Malalo Kec. Batipuh Selatan	Sedang	1 Kali (Selasa)
10	Pasar Simabur	Nagari Simabur Kec. Pariangan	Sedang	1 Kali (Senin)
11	Pasar Ombilin	Nagari Simawang Kec. Rambatan	Sedang/ Baik	2 Kali (Rabu dan Minggu)
12	Pasar Rambatan	Nagari Rambatan Kec. Rambatan	Sedang/ Baik	1 Kali (Selasa)
13	Pasar Balimbing	Nagari Balimbing Kec. Rambatan	Sedang/ Baik	1 Kali (Sabtu)
14	Pasar Turawan	Nagari III Koto Kec. Rambatan	Kurang	
15	Pasar Sungai Tarab	Nagari Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab	Baik	1 Kali (Rabu)
16	Pasar Rao-rao	Nagari Rao-rao Kec. Sungai Tarab	Sedang	2 Kali (Rabu dan Sabtu)
17	Pasar Pasia Laweh	Nagari Pasia Laweh Kec. Sungai Tarab		
18	Pasar Gurun	Nagari Gurun Kec. Sungai Tarab	Rusak	1 Kali (Sabtu)
19	Pasar Tabek Patah	Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung	Baik	1 Kali (Rabu)
20	Pasar Salimpaung	Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung	Sedang	1 Kali (Jumat)
21	Pasar Ahad	Nagari Sumanik Kec. Salimpaung	Sedang	1 Kali (Minggu)
22	Pasar Situmbuk	Nagari Situmbuk Kec. Salimpaung	Rusak	1 Kali (Kamis)
23	Pasar Pakan Kamis	Nagari Tanjung Alam Kec. Tanjung Baru	Sedang	2 Kali (Senin dan Kamis)
24	Pasar Pakan	Nagari Barulak Kec.	Sedang	2 Kali

	Sabtu	TanjungBaru		(Sabtu dan Selasa)
25	Pasar Tanjung	Nagari Tanjung Kec. Sungayang	Sedang	1 Kali (Jumat)
26	Pasar Sungayang	Nagari Sungayang Kec. Sungayang	Sedang	1 Kali (Senin)
27	Pasar Baruh Bukik	Nagari Andaleh Kec. Sungayang	Baik	1 Kali (Jumat)
28	Pasar Minggu	Nagari Saruaso Kec. TanjungEmas	Sedang	1 Kali (Minggu)
29	Pasar Balai Sabtu	Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas	Sedang	1 Kali (Sabtu)
30	Pasar Balai Selasa	Nagari Koto Tengah Kec. Tanjung Emas	Baik	1 Kali (Selasa)
31	Pasar Guguak Cino	Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas	Kurang	1 Kali (Sabtu)
32	Pasar Rabu	Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting	Kurang	1 Kali (Rabu)
33	Pasar Ambek Atar	Nagari Atar Kec. Padang Ganting	Kurang	1 Kali (Rabu)
34	Pasar Senin	Nagari Taratak VIII Atar Kec. Padang Ganting	Kurang	1 Kali (Senin)
35	Pasar Baringin Ungka	Nagari Taratak XII Atar Kec. Padang Ganting	Sedang	1 Kali (Jumat)
36	Pasar Taluak	Nagari Taluak Kec. Lintau Buo	Sedang	1 Kali (Senin)
37	Pasar Buo	Nagari Buo Kec. Lintau Buo	Sedang	1 Kali (Minggu)
38	Pasar Tigo Jangko	Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo	Sedang	1 Kali (Jumat)
39	Pasar Balai Selasa	Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara	Kurang	1 Kali (Selasa)
40	Pasar Balai Tengah	Nagari Balai Tengah Kec. Lintau Buo Utara	Sedang	1 Kali (Kamis)
41	Pasar Ranah Batu	Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara	Sedang	1 Kali (Sabtu)
42	Pasar Serikat C Batusangkar	Nagari Baringin Kec. LimoKaum	Baik	7 Kali (Senin-Minggu)

Sumber: Dinas Koperindagpastam

Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari jumlah pasar-pasar tradisional yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan,

Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAGPASTAM) Kabupaten Tanah Datar, hal ini tentu akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan Retribusi daerah khususnya Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Datar. Dengan begitu seharusnya retribusi pelayanan pasar dapat menjadi salah satu retribusi yang memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Tanah Datar.

C. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditargetkan, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.⁷⁶

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁷⁷

Tingkat Efektifitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁷⁸

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

⁷⁶Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2016), hal. 141

⁷⁷Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), hal. 182

⁷⁸Mardiasmo, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2007), hal. 129

Berikut ini adalah Perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2009-2016:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebagai berikut:

1) Tahun 2009

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.368.687.060,00}}{\text{Rp.327.977.000,00}} \times 100\% = 112,41\%$$

2) Tahun 2010

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.449.535.190,00}}{\text{Rp.375.000.000,00}} \times 100\% = 119,87\%$$

3) Tahun 2011

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.449.344.450,00}}{\text{Rp. 379.716.500,00}} \times 100\% = 118,33\%$$

4) Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.473.999.530,00}}{\text{Rp. 626.340.000,00}} \times 100\% = 75,67 \%$$

5) Tahun 2013				
Efektivitas =	$\frac{\text{Rp. 551.042.760,00}}{\text{Rp. 689.740.400,00}}$	X 100%	=	79,89 %
6) Tahun 2014				
Efektivitas =	$\frac{\text{Rp. 740.669.240,00}}{\text{Rp. 704.196.400,00}}$	X 100%	=	105,17 %
7) Tahun 2015				
Efektivitas =	$\frac{\text{Rp. 682.207.390,00}}{\text{Rp. 657.814.400,00}}$	X 100%	=	103,70 %
8) Tahun 2016				
Efektivitas =	$\frac{\text{Rp.678.879.930,00}}{\text{Rp. 679.340.400,00}}$	X 100%	=	99,93 %

Dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

Tabel4.2
Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Datar Periode tahun 2009-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %	Skala Persentase
2009	Rp.327.977.000,00	Rp.368.687.060,00	112,41%	Sangat Efektif
2010	Rp.375.000.000,00	Rp.449.535.190,00	119,87 %	Sangat Efektif
2011	Rp. 379.716.500,00	Rp.449.344.450,00	118,33%	Sangat Efektif
2012	Rp. 626.340.000,00	Rp.473.999.530,00	75,67%	Kurang Efektif
2013	Rp. 689.740.400,00	Rp.551.042.760,00	79,89%	Kurang Efektif
2014	Rp. 704.196.400,00	Rp.740.669.240,00	105,17%	Sangat Efektif
2015	Rp. 657.814.400,00	Rp.682.207.390,00	103,70%	Sangat Efektif
2016	Rp. 679.340.400,00	Rp.678.879.930,00	99,93 %	Cukup Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)

Berdasarkan tabel di atas dilihat tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2009 sampai 2016 tidak stabil dan mengalami naik turun. Pada tahun 2009 tingkat efektivitasnya tergolong sangat efektif dengan persentase sebesar 112,41% melebihi dari 100% batas standar efektivitasnya, hal ini akan menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitasnya maka penerimaan daerah semakin baik. Kabupaten Tanah Datar menetapkan target penerimaan yang harus diraih pada tahun 2009 sebesar Rp. 327.977.000,00 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 368.687.060,00, Pada tahun 2010 Pemerintah daerah sedikit menaikkan target penerimaan sebesar Rp.375.000.000,00 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 449.535.190,00, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan tingkat efektivitasnya sangat efektif dengan persentase sebesar 119,87%, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah semakin baik. Pada tahun 2011 pemerintah daerah kembali menaikkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 379.716.500,00 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang diperoleh sebesar Rp. 449.344.450,00. Mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dengan tingkat efektivitasnya sangat efektif dengan persentase sebesar 118,33%, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah semakin baik.

Pada tahun 2012, Pemerintah kembali menaikkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 626.340.000,00 bahkan kenaikan tersebut sangat signifikan dari tahun sebelumnya karena Pemerintah menganggap bahwa pada tahun tersebut penerimaannya bisa melebihi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut Pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan daerah terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.⁷⁹ Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Abi Hanifah, SE Selaku Kasi Pelayanan dan Jasa Dinas Koperindagpastam, tanggal 20 Januari 2017

retribusi pelayanan pasar hanya sebesar Rp. 473.999.530,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dengan persentase efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar 118,33% menjadi 75,67% dan tergolong kurang efektif, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah kurang baik.

Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menaikkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 689.740.400,00 akan tetapi realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun tersebut masih jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 551.042.760,00, namun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dilihat dari tingkat efektivitasnya kembali tergolong kurang efektif, dengan skala persentasenya sebesar 78,89%, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah kurang baik, namun mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2012 yang skala persentasenya sebesar 75,67%. Penyebab terjadinya hal tersebut karena masih banyaknya ditemukan kasus bahwa pedagang enggan untuk membayar retribusi serta rehabilitas sebahagian pasar yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan tujuan memperbaiki sarana dan prasarana dan tingkat kenaikan target yang terlalu tinggi oleh Pemerintah daerah yang hanya berpatokan atau berpedoman dari hasil atau potensi tahun sebelumnya tanpa melihat realita dilapangan.⁸⁰

Dengan selesainya rehabilitas pasar-pasar dari sebagian pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar serta pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah demi kemajuan pasar maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meningkatkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 704.196.400,00 dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar mencapai Rp. 740.669.240,00. Jauh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan tingkat efektivitasnya sebesar 105,17% yang tergolong sangat

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Azwardi (Kasi Datalegalitas Pengkajian) DPPKA , Tanggal 16 Desember 2016

efektif, hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitasnya maka penerimaan daerah semakin baik.

Tahun 2015 tingkat efektivitas retribusi pelayanan pasar Kabupaten Tanah Datar kembali sangat efektif, dengan skala persentasenya sebesar 103,70%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 yang skala persentasenya sebesar 105,17 %, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah semakin baik. Akan tetapi Pemerintah daerah menurunkan target penerimaan yang harus dicapai dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena Pemerintah daerah memindahkan tempat pelataran-pelataran yang sebelumnya berada di sepanjang luas Jl. Soekarno Hatta ke jalan Jl. Katumanggungan tepatnya pada pasar papan sekarang yang tempatnya kurang luas dibandingkan dengan luas Jl. Soekarno Hatta sehingga membuat jumlah pelataran-pelataran menjadi berkurang.⁸¹ Namun target penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2015 sebesar Rp. 657.814.400,00 dan yang terealisasi dari penerimaan retribusi pelayanan pasar yang sebesar Rp.682.207.390,00.

Pada tahun 2016 Pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar kembali sedikit menaikkan target penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun sebelumnya akan tetapi target tersebut dibawah realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun sebelumnya yakni tahun 2015 dengan alasan agar tingkat efektivitas tetap terjaga bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target penerimaan yang diusung oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar Rp.679.340.400,00 namun pada kenyataannya realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar kembali tidak memenuhi dari target yang diharapkan yaitu hanya sebesar Rp. 678.879.930,00. Dilihat dari tingkat efektivitasnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2016 tergolong

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Abi Hanifah, SE Selaku Kasi Pelayanan dan Jasa Dinas Koperindagpastam, tanggal 20 Januari 2017

cukup efektif karena kurang dari 100% dengan rasio persentase 99,93%, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan daerah cukup baik.

Berdasarkan tingkat rasio efektivitasnya semakin tinggi persentase, menggambarkan bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik, dilihat pada tahun 2009 tingkat persentase sebesar 112,41%, pada tahun 2010 tingkat persentase sebesar 119,87%, pada tahun 2011 tingkat persentase sebesar 118,33%, pada tahun 2012 persentase sebesar 75,67% , tahun 2013 persentase 79,89%, dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut kemampuan daerahnya dalam pencapaiannya kurang baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tergolong rendah, tahun 2014 persentase sebesar 105,17%, pada tahun 2015 persentase sebesar 103,70% dinilai kemampuan daerah mencapai tujuan kembali baik. Dan pada tahun 2016 persentase sebesar 99,93% kembali mengalami penurunan namun dapat dikatakan bahwa pencapaian pada tahun tersebut cukup baik.

D. Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.⁸²

⁸²Mahmudi, *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 151

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Penerimaan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁸³

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Total PAD}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Kontribusi per masing-masing retribusi daerah digunakan rasio berikut dengan cara:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi pelayanan pasar}}{\text{Realisasi Total PAD}} \times 100 \%$$

Berikut ini adalah Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2009-2016:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi pelayanan pasar}}{\text{Realisasi Total PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Rumus Kontribusi diatas dapat dilakukan perhitungan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai berikut:

1) Tahun 2009

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp.368.687.060,00}}{\text{Rp.33.373.944.244,00}} \times 100\% = 1,10\%$$

⁸³Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja...*, hal 153

2) Tahun 2010			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.449.535.190,00}}{\text{Rp.43.061.751.381,00}}$	X 100%	= 1,04%
3) Tahun 2011			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.449.344.450,00}}{\text{Rp. 60.100.782.252,00}}$	X 100%	= 0,74%
4) Tahun 2012			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.473.999.530,00}}{\text{Rp. 60.004.818.401,88}}$	X 100%	= 0,78 %
5) Tahun 2013			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp. 551.042.760,00}}{\text{Rp. 62.198.420.469,28}}$	X 100%	= 0,88 %
6) Tahun 2014			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.740.669.240,00}}{\text{Rp. 99.750.501.841,69}}$	X 100%	= 0,74%
7) Tahun 2015			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.682.207.390,00}}{\text{Rp. 112.072.726.547,89}}$	X 100%	= 0,60 %
8) Tahun 2016			
Kontribusi =	$\frac{\text{Rp.678.879.930,00}}{\text{Rp.113.058.354.710,00}}$	X 100%	= 0,60 %

Dari hasil perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar
periode tahun 2009-2016

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase %	Skala Persentase
2009	368.687.060,00	33.373.944.244,00	1,10%	Sangat Kurang
2010	449.535.190,00	43.061.751.381,00	1,04 %	Sangat Kurang
2011	449.344.450,00	60.100.782.252,00	0,74%	Sangat Kurang
2012	473.999.530,00	60.004.818.401,88	0,78%	Sangat Kurang
2013	551.042.760,00	62.198.420.469,28	0,88%	Sangat Kurang
2014	740.669.240,00	99.750.501.841,69	0,74 %	Sangat Kurang
2015	682.207.390,00	112.072.726.547,89	0,60%	Sangat Kurang
2016	678.879.930,00	113.058.354.710,00	0,60%	Sangat Kurang

Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar(data yang diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami naik turun sehingga mempengaruhi jumlah persentase kontribusi yang diperoleh oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2009 persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar sebesar 1,10%. Jumlah yang sangat jauh dari 100%, ini tergolong dalam sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dengan penerimaan retribusi sebesar Rp.368.687.060,00, dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.33.373.944.244,00. Pada tahun 2010 persentase kontribusi sebesar 1,04% mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun pada realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan, dengan penerimaannya sebesar Rp.449.535.190,00, dan dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 43.061.751.381,00 juga

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp. 449.344.450,00. Sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 60.100.782.252,00, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase kontribusi sebesar 0,74%.

Pada tahun 2012 penerimaan retribusi mengalami kenaikan menjadi Rp. 473.999.530,00 dilihat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 449.344.450,00 walaupun kenaikannya tidak banyak hal ini cukup mempengaruhi skala persentase pada kontribusi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,78% naik sebesar 0,04%, ini masih tergolong sangat kurang berkontribusi. Dan dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mana penerimaannya sebesar Rp.60.100.782.252,00 sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini sebesar Rp. 60.004.818.401,88

Pada tahun 2013 penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan sebesar Rp. 551.042.760,00 dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mengalami kenaikan yakni menjadi Rp. 62.198.420.469,28 sehingga membuat persentase kontribusi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,78% naik menjadi 0,88% meskipun demikian tetap saja penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun ini masih tergolong sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2014 persentase kontribusi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,14% sehingga persentase kontribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 0,74%, walaupun pada kenyataannya mengalami penurunan namun

realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp.740.669.240,00 dan dilihat juga dari Pendapatan Asli Daerahnya jauh meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 99.750.501.841,69.

Pada tahun 2015 persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2014 sebesar 0,74% menjadi 0,60% turun sebesar 0,14%. Namun jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar pun terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya yang menjadi Rp. 682.207.390,00 akan tetapi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni penerimaannya sebesar Rp. 112.072.726.547,89 jelas jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar yang sedikit akan mempengaruhi skala persentase kontribusi, golongan persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar pada tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya masih sangat kurang berkontribusi karena masih dibawah 10%.

Pada tahun 2016 persentase kontribusi sebesar 0,60% sama halnya dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2015, hal ini juga tergolong kedalam sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, yakni penerimaannya sebesar Rp. 678.879.930,00 dan dilihat juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni penerimaannya sebesar Rp.113.058.354.710,00. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwardi selaku Kasi data legalitas pengkajian di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten

Tanah Datar.⁸⁴ Ini disebabkan karena besarnya belanja untuk pembangunan, maka sesuai dengan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD yang membuat yang menuntut adanya peningkatan dalam Pendapatan Daerah guna meningkatkan pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Maka dibuatlah kebijakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak daerah dan Retribusi daerah khususnya pada Retribusi Pelayanan Pasar.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang, hal ini akan memberikan dampak bahwasanya retribusi pelayanan pasar tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Jadi pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan daerah dari yang lainnya seperti pajak dan retribusi lainnya sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah bisa memenuhi belanja daerah dan pembangunan daerah seperti meningkatkan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus untuk wajib retribusi sehingga penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan pasar bisa ditingkatkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Azwardi selaku Data Legalitas pengkajian di DPPKAD Kabupaten Tanah Datar tanggal 16 Desember 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan melihat Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan adalah :

1. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2009 sampai 2016 Kabupaten Tanah Datar cenderung tergolong sangat efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Efektif atau tidaknya terlihat dari penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2009 tergolong sangat efektif dengan skala persentase sebesar 112,41%, pada tahun 2010 tergolong sangat efektif dengan skala persentase sebesar 119,87% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 tergolong sangat efektif dengan skala persentase sebesar 118,33%, mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ini tergolong kurang efektif dengan skala persentase sebesar 75,67%, pada tahun 2013 juga masih tergolong kurang efektif dengan skala persentase sebesar Rp. 79,89%, pada tahun 2014 efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar kembali mengalami kenaikan dengan skala persentase sebesar 105,17% ini tergolong sangat efektif, pada tahun 2015 efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar kembali tergolong sangat efektif dengan skala persentase sebesar 103,70%, akan tetapi mengalami sedikit penurunan rasio persentase efektivitasnya dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2016 dengan

terjadinya ketidak tercapaian target yang diharapkan sehingga efektivitas penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan skala persentase 99,93% dan tergolong cukup efektif. Semakin tinggi persentasenya maka menggambarkan bahwa kemampuan daerah semakin baik.

2. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2009 sampai 2016 tergolong ke dalam skala sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya tidak ada yang mencapai 10%. Pada tahun 2009 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan skala persentase sebesar 1,10%, Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan skala persentase sebesar 1,04% mengalami sedikit penurunan skala persentase dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 dengan skala persentase 0,74%, mengalami penurunan skala persentase dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 dengan skala persentase sebesar 0,78% mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013 mengalami kenaikan lagi dengan skala persentase sebesar 0,88%, pada tahun 2014 kontribusi retribusi pelayanan pasar mengalami sedikit penurunan dengan skala persentase sebesar 0,74%, pada tahun 2015 juga mengalami penurunan dengan skala persentase sebesar 0,60% dan pada tahun 2016 dengan skala persentase sebesar 0,60%.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian di atas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar agar lebih realistis untuk tahun kedepannya dalam penetapan target penerimaan retribusi pelayanan pasar, jangan berdasarkan potensial dari tahun-tahun sebelumnya agar setiap yang akan dilewati efektif bahkan sangat efektif.
2. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan dan kenyamanan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan potensi yang ada dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para pemilik kios, los, atau pelataran yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan.
4. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Ahmad Yani,SH.,MM. 2010. *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*: Ed. Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Depdagri, KemendagriNo. 690.900.327 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Dharma Setywan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-2,
- Haw. Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2009
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga
- John M. Echols and Hasan Sahdily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia Cetakan XXIII*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Usaha
- Kesit Bambang Prakosa. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: UII Press
- Komaruddin Hidayat, dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN SyarifHidayatullah
- Kuncoro. 2010. *Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: RinekaCipta
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

- Mardiasmo. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Marihot P. Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mohammad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Pardiat. 2010 *Akuntansi Pajak*: Edisi Keempat, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hal 2-3
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Jakarta: Salemba Empat
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Edisi Terbaru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta: Lampiran dan Format Laporan
- Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* Jakarta: Sinar Garafika Offset
- Thomas Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Jakarta: PT Indeks
- Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah edisi 2011 Bandung: fokus media
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : data.p3m@gmail.com

17 Januari 2017

Nomor : B- 139.c /In.27/L.I/TL.00/ 01 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Ifri Maidi Saputra / 12231037
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 17 Januari 1993
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304051701930002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Nan IX Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar**
Lokasi : Kantor DPPKA Kabupaten Tanah Datar
Waktu : 18 Januari 2017 s.d 18 Maret 2017
Dosen Pembimbing 1 : Gampito, SE., M.Si.
Dosen Pembimbing 2 : Sri Adella Fitri, SE., M.Si.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Agus Efendi, S.Ag., M.Ag.
197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/162/KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-139.c/In-27/L.I/TL.00/01/2017, tanggal 17 Januari 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **IFRI MAIDI SAPUTRA**
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar 17 Januari 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Datar No 83 Jorong Nan IX Nagari Pagaruyung
Kartu Identitas : NIK. 1304051701930002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PAD KAB. TANAH DATAR"**
Lokasi Penelitian : Kantor DPPKA Kab.Tanah Datar
W a k t u : 19 Januari s.d 19 Maret 2017
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 19 Januari s.d 19 Maret 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Januari 2017,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASUBBAG TATA USAHA



EVAWATI Z. KARIA, S. Sos,
NIP. 19720818 199202 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Rektor IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Yang bersangkutan....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Telp. (0752) 71160, Fax. 71160
BATUSANGKAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: / /BKD-2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

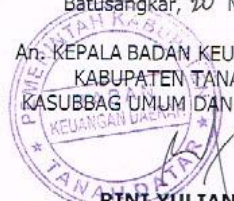
Nama : **IFRI MAIDI SAPUTRA**
Tempat/ Tgl Lahir : Batusangkar, 17 Januari 1993
NIK : 12 231 037
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Akuntansi Syariah
Alamat : Jln. Datar No 83 Jorong Nan IX Nagari Pagaruyung

Telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Tanggal 19 Januari s.d 19 Maret 2017 dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PAD KAB. TANAH DATAR"**.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Maret 2017

An: KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



RINI YULIANTI, SE

NIP. 19730505 199403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,
(KOPERINDAG)**

Jln. M. Yamin, SH Telp. (0752) 71039 – Fax (0752) 71147
BATUSANGKAR 27281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 630 / 162 / Sekr/UP/I/2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama : IFRI MAIDI SAPUTRA
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 17 Januari 1993
NIK : 1304051701930002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Nan IX, Nagari Pagaruyung Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah
Datar

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
Kabupaten Tanah Datar dari tanggal 19 Januari s/d 19 Maret 2017 dengan Judul :
**“EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di : Batusangkar

Pada Tanggal : 20 Maret 2017

**An. KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN TANAH DATAR
Kasubbag Umum dan Kepegawaian**



DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2009
Keadaaan s/d 14 Desember 2009

No	DINAS / INSTANSI	TARGET PERUBAHAN 2009	REALISASI PENERIMAAN			%	JUMLAH Lebih/Kurang
			s/d 10 Des 2009	11 s/d 14 Des '2009	s/d 14 Des ' 2009		
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	20.428.291.297,00	23.384.884.016,00	17.085.901,00	22.411.748.916,00	109,75	1.991.458.619,00
	- Pajak Hotel	43.000.000,00	26.276.130,00	172.728,00	26.448.858,00	61,51	(16.551.142,00)
	- Pajak Restoran	478.000.000,00	340.488.740,00	6.837.800,00	347.326.540,00	72,67	(130.673.460,00)
	- Pajak Hiburan	7.500.000,00	3.449.800,00	-	3.449.800,00	46,00	(4.050.200,00)
	- Pajak Reklame	60.000.000,00	61.842.542,00	455.000,00	92.297.542,00	98,24	(121.682.088,00)
	- Pajak Penerangan Jalan	2.525.000.000,00	2.403.307.902,00	-	2.403.307.902,00	95,18	(711.000,00)
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bagian Umum)	62.660.000,00	68.488.000,00	3.321.000,00	61.789.000,00	98,68	198.888.390,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.795.601.287,00	10.995.389.687,00	-	10.995.389.687,00	101,84	198.888.390,00
	- Perusda Tahun Sepakat	19.000.000,00	19.000.000,00	-	19.000.000,00	100,00	2.066.950.587,00
	- BUMD	10.777.501.287,00	10.976.389.687,00	6.299.373,00	8.481.740.887,00	132,22	1.571.940.850,00
	- Lain-lain PAD Yang Sah	6.101.980.000,00	7.969.841.477,00	4.089.373,00	7.673.930.850,00	126,76	(1.348.857.853,00)
1	BPD/ Bank Nagari	3.505.980.000,00	2.157.131.216,00	2.088.542,00	5.514.798.803,00	212,43	2.918.798.803,00
	- Jasa Giro	2.596.000.000,00	199.702.735,00	1.500.000,00	201.202.735,00	167,67	81.202.735,00
	- Bunga Deposito	120.000.000,00	199.702.735,00	1.500.000,00	201.202.735,00	167,67	81.202.735,00
2	PT, BPR	120.000.000,00	31.412.635,00	-	31.412.635,00	169,80	12.912.635,00
	- Bunga Deposito	18.500.000,00	-	-	-	-	(13.854.500,00)
3	Angkutan Coklat Pungutan Kendaraan (Bagian Umum)	74.000.000,00	60.145.500,00	-	60.145.500,00	81,28	12.000.000,00
4	Penerimaan Lain-lain	22.000.000,00	34.000.000,00	-	34.000.000,00	154,55	(25.854.500,00)
	- Perusda Tahun Sepakat	52.000.000,00	26.145.500,00	-	26.145.500,00	50,28	(95.300.000,00)
	- DPPA/Pasar Kecamatan/Nagari	100.300.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	4,99	(95.000.000,00)
	- Legas, dll	100.300.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5,00	(300.000,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga	100.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
	- PDAM	300.000,00	-	710.000,00	510.048.867,00	-	-
	- Kebang Lomas	PM	609.338.867,00	-	20.680.000,00	62,28	(4.450.000,00)
6	Penerimaan Lain-lain (Temuan, Denda, LHP, Dll)	25.000.000,00	20.550.000,00	-	20.550.000,00	82,20	(4.450.000,00)
2	Dinas Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	25.000.000,00	20.550.000,00	-	20.550.000,00	82,20	(91.212.984,00)
	- Penerimaan Lain-lain	256.430.000,00	184.689.229,00	19.627.787,00	175.217.016,00	68,75	(80.830.584,00)
3	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Pertambangan	248.670.000,00	147.211.829,00	10.827.787,00	157.839.418,00	63,47	(7.710.000,00)
	- Pajak Pengambilan Galeri Golongan C	17.480.000,00	9.750.000,00	-	9.750.000,00	55,84	7.327.600,00
	- Penerimaan Lain-lain	300.000,00	7.627.600,00	-	7.627.600,00	2.542,53	(225.808.500,00)
	- Sumbangan Pihak Ketiga	658.000.000,00	324.173.600,00	-	324.173.600,00	49,41	(199.270.500,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum	300.000.000,00	100.729.500,00	-	100.729.500,00	33,58	(26.556.000,00)
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	223.444.000,00	-	223.444.000,00	89,38	(11.288.320,00)
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	28.711.680,00	-	28.711.680,00	71,78	(5.000.000,00)
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.000.000,00	28.711.680,00	-	28.711.680,00	62,03	(6.288.320,00)
	- Penerimaan Lain-lain	35.000.000,00	133.823.800,00	7.869.000,00	141.392.800,00	17,89	(662.507.750,00)
	- Sumbangan Pihak Ketiga	603.899.750,00	133.523.000,00	7.869.000,00	141.392.000,00	17,59	(662.507.750,00)
6	Dinas Kesehatan	603.899.750,00	133.523.000,00	-	133.523.000,00	22,11	(994.774.324,00)
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.680.000.000,00	6.696.225.678,00	-	6.696.225.678,00	86,74	(994.774.324,00)
7	Rumah Sakit Umum Daerah	7.500.000.000,00	6.905.225.678,00	-	6.905.225.678,00	92,07	58.894.200,00
	- Pendapatan BLUD	327.380.000,00	382.389.100,00	1.855.100,00	384.244.200,00	117,38	6.327.400,00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	23.827.400,00	-	23.827.400,00	136,16	47.417.800,00
	- Retribusi Parkir	230.000.000,00	275.562.700,00	1.855.100,00	277.417.800,00	120,62	785.000,00
	- Retribusi Pungutan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.765.000,00	-	2.765.000,00	138,25	24.449.000,00
	- Retribusi Izin Trayek	32.000.000,00	56.449.000,00	-	56.449.000,00	176,40	(22.065.000,00)
	- Penerimaan Lain-lain	45.850.000,00	23.785.000,00	-	23.785.000,00	51,88	(22.065.000,00)
	- Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-

9	Belanja Lingkungan Hidup	117.200.000,00	107.777.114,00		107.777.114,00	91,96	(9.422.886,00)
	- Retribusi Pelayanan Partisipatif	117.200.000,00	107.777.114,00		107.777.114,00	91,96	(9.422.886,00)
	- Kesehatan	200.000.000,00	357.293.800,00	3.275.000,00	354.038.800,00	94,88	(15.431.500,00)
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	300.000.000,00	281.293.500,00	3.275.000,00	284.568.500,00	94,86	(15.431.500,00)
	- Retribusi Tempat Pelebaran dan Chitranga	27.145.000,00	26.850.000,00		26.850.000,00	98,91	(295.000,00)
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
	- Retribusi Tempat Pelebaran dan Chitranga	380.000.000,00	357.215.000,00		357.215.000,00	93,99	(22.785.000,00)
12	Sekretariat Daerah						
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (DALBANG)	350.000.000,00	357.215.000,00		357.215.000,00	102,06	7.215.000,00
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (DALBANG)	180.000.000,00	218.711.440,00		218.711.440,00	121,51	38.711.440,00
13	Dinas Pemukiman dan Perikanan						
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	28.000.000,00	17.018.500,00		17.018.500,00	60,78	(10.981.500,00)
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	122.000.000,00	202.732.940,00		202.732.940,00	165,92	80.732.940,00
	- Perikanan Lain-lain	616.807.000,00	628.671.120,00	7.343.020,00	633.914.140,00	103,43	15.317.140,00
14	Dinas Perdagangan dan Pasar						
	- Retribusi Pelayanan Pasar	327.877.000,00	340.328.120,00	2.965.000,00	343.294.140,00	104,87	15.317.140,00
	- Retribusi Jasa Usaha	175.980.000,00	172.863.000,00	3.778.000,00	176.641.000,00	100,38	681.000,00
	- Perikanan Lain-lain	12.000.000,00	13.379.000,00	600.000,00	13.979.000,00	116,49	1.979.000,00
15	Kantor Pelayanan Perikanan Terpadu (KPPPT)						
	- Retribusi Jasa Usaha	164.000.000,00	242.724.410,00	6.400.000,00	259.124.410,00	158,00	95.124.410,00
16	Kantor Pelayanan Perikanan Terpadu (KPPPT)						
	- Retribusi Jasa Usaha	17.500.000,00	25.916.160,00	60.000,00	26.476.160,00	151,31	8.976.160,00
	- Retribusi Jasa Usaha dan tanda daftar usaha hulu	11.150.000,00	8.700.000,00		8.700.000,00	77,57	(2.450.000,00)
	- Retribusi Jasa Usaha perdagangan / SUP	80.000.000,00	79.521.960,00	1.780.300,00	81.302.260,00	101,63	1.302.260,00
	- Retribusi Jasa Usaha (RTU)	6.000.000,00	10.850.000,00		10.850.000,00	180,83	4.850.000,00
	- Retribusi Jasa Usaha jasa Kontribusi nasional	1.350.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	96,30	(50.000,00)
	- Retribusi Jasa Usaha perdagangan	60.000.000,00	121.436.260,00	4.129.300,00	125.565.560,00	209,28	65.565.560,00
	- Retribusi Jasa Usaha (RTU)						
	JUMLAH	31.643.773.947,00	31.721.008.784,00	66.816.408,00	31.777.825.192,00	100,72	227.152.145,00
	Uraian		2.608.248.106,00	2.952.966,00	2.611.200.972,00		2.611.200.972,00

Catatan : Dinas Perdagangan dan Pasar
 s/d tanggal 14 Desember 2009 pada Retribusi Jasa Usaha
 sebesar Rp. 176.641.000,- terdiri dari:
 1. Retribusi Pemukiman Kelayakan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir / Perikanan
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan
 4. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
 Jumlah

Batanghari, Desember 2009
 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
 KAB. TANAH DATAR
 Sekretaris
 DARFIZAL, SE, MAJ
 NIP. 19650518190003 1 006

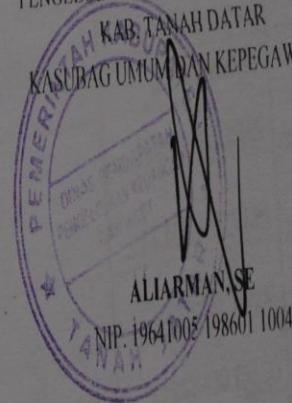
DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2009
 Keadaan s/d 31 Desember 2009

No	DINAS / INSTANSI	TARGET PERUBAHAN 2009	REALISASI PENERIMAAN		%	JUMLAH Lebih/Kurang	
			s/d 31 Desember 2009	s/d 31 Des ' 2009			
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	20.420.291.287,00	22.414.458.388,00	804.428.191,00	23.224.716.931,00	113,72	2.804.424.634,00
	- Pajak Hotel	43.000.000,00	26.276.120,00	2.115.500,00	28.391.620,00	66,03	(14.608.370,00)
	- Pajak Restoran	478.000.000,00	347.323.540,00	157.237.637,00	504.561.177,00	105,56	26.561.177,00
	- Pajak Hiburan	7.500.000,00	3.449.800,00		3.449.800,00	46,00	(4.050.200,00)
	- Pajak Reklame	80.000.000,00	95.367.342,00	5.383.375,00	100.750.717,00	126,31	20.750.717,00
	- Pajak Penerangan Jalan	2.525.000.000,00	2.403.307.902,00	125.444.160,00	2.528.752.062,00	100,15	3.752.062,00
	- Retribusi Pemukiman Kelayakan Daerah (Bagian Umum)	62.800.000,00	81.789.000,00	48.814.000,00	110.603.000,00	176,06	48.103.000,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.796.591.287,00	10.896.399.687,00	3.000.000,00	10.899.399.687,00	101,87	201.898.399,00
	- Perusda Tuah Sepakat	19.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	115,79	3.000.000,00

- BUMD	10.777.501.297,00	13.976.269.687,00	462.491.919,00	10.676.309.687,00	101,85	198.688.390,00
- Lain-lain PAD Yang Sah	6.414.790.000,00	6.491.649.999,00	401.092.892,00	6.090.547.107,00	136,82	2.535.044.858,00
1. BPD/Bank Nagari	3.525.990.000,00	7.670.717.865,00	401.092.892,00	8.071.810.757,00	132,28	1.989.820.757,00
- Jasa Gns	2.596.100.000,00	2.155.919.962,00	28.163.724,00	2.184.082.786,00	62,30	1.321.907.214,00
- Bunga Deposito	120.000.000,00	5.514.798.903,00	372.929.168,00	5.887.727.971,00	228,80	100.744.746,00
2. PT BPR	120.000.000,00	203.484.052,00	17.260.994,00	220.744.746,00	189,95	100.744.746,00
- Bunga Deposito	18.500.000,00	31.705.915,00	5.833.360,00	37.539.355,00	202,92	19.029.355,00
3. Anggaran Cicilan Penjualan Kendaraan (Bagian Umum)	74.000.000,00	60.145.500,00	2.850.000,00	62.995.500,00	85,13	(11.004.500,00)
4. Penempatan Lain-lain	22.000.000,00	34.000.000,00	-	34.000.000,00	154,55	12.000.000,00
- Perwujudan Tanah Seyakiti	-	-	2.850.000,00	28.995.500,00	55,78	(23.004.500,00)
- DPPPA (Pasar Karcas/In/Agar/ Lages, dll)	52.000.000,00	26.145.500,00	-	5.000.000,00	4,69	(95.300.000,00)
5. Sumbangan Pihak Ketiga	100.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5,00	(95.000.000,00)
- PDAM	300.000,00	-	41.247.933,00	661.744.600,00	-	(300.000,00)
- Karang Liman	PM	510.496.547,00	-	-	-	200.000,00
6. Penempatan Lain-lain (Tamu, Denda, LHP, dll)	25.000.000,00	20.550.000,00	4.650.000,00	25.200.000,00	100,80	200.000,00
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	25.000.000,00	20.550.000,00	4.650.000,00	25.200.000,00	100,80	200.000,00
- Penempatan Lain-lain	25.000.000,00	20.550.000,00	4.650.000,00	25.200.000,00	100,80	(7.710.549,00)
3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Pertambangan	266.430.000,00	176.217.016,00	83.692.435,00	269.719.491,00	97,11	(7.638.149,00)
- Pajak Pengambilan Galan Golongan C	248.670.000,00	157.839.416,00	83.192.435,00	241.031.851,00	96,93	(7.710.000,00)
- Penempatan Lain-lain	17.460.000,00	9.750.000,00	-	9.750.000,00	55,84	7.637.600,00
- Sumbangan Pihak Ketiga	300.000,00	7.627.600,00	310.000,00	7.937.600,00	2.645,87	(205.842.500,00)
4. Dinas Pekerjaan Umum	669.869.899,00	324.173.699,00	19.894.000,00	344.157.699,00	62,67	(184.315.500,00)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	100.729.500,00	14.955.000,00	115.684.500,00	38,56	(21.537.000,00)
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	223.444.000,00	5.029.000,00	228.473.000,00	91,39	(11.288.320,00)
5. Dinas Kesehatan dan Penyakit	40.000.000,00	28.711.690,00	-	28.711.690,00	71,78	(5.000.000,00)
- Penempatan Lain-lain	5.000.000,00	-	-	28.711.690,00	62,03	(6.288.320,00)
- Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000,00	28.711.690,00	136.790.796,00	278.992.796,00	34,69	(525.807.044,00)
6. Dinas Kesehatan	803.899.750,00	141.392.000,00	136.700.706,00	278.092.706,00	34,59	(525.807.044,00)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.690.000.000,00	4.698.225.678,00	378.657.846,00	6.883.783.342,00	91,78	(616.216.658,00)
7. Rumah Sakit Umum Daerah	7.500.000.000,00	6.505.225.678,00	378.657.846,00	6.883.783.342,00	91,78	(616.216.658,00)
- Pendapatan BUMD	327.380.000,00	384.248.200,00	28.838.100,00	413.086.300,00	126,19	85.733.300,00
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	21.450.000,00	920.000,00	22.370.000,00	127,83	4.870.000,00
- Retribusi Parkir	230.000.000,00	279.796.200,00	13.989.100,00	293.784.300,00	127,74	63.794.300,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	3.560.000,00	540.000,00	4.100.000,00	205,00	2.100.000,00
- Retribusi Izin Trayek	32.000.000,00	55.654.000,00	11.145.000,00	66.799.000,00	208,75	34.799.000,00
- Penempatan Lain-lain	45.650.000,00	23.785.000,00	2.235.000,00	26.020.000,00	56,75	(19.830.000,00)
- Retribusi Terminal	117.390.000,00	107.777.114,00	20.421.190,00	128.198.214,00	109,38	10.998.214,00
9. Badan Lingkungan Hidup	117.200.000,00	107.777.114,00	20.421.190,00	128.198.214,00	109,38	8.191.500,00
- Retribusi Pelayanan Pemertanahan Kabupaten	300.000.000,00	284.568.500,00	23.623.000,00	308.191.500,00	102,73	8.191.500,00
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	300.000.000,00	284.568.500,00	23.623.000,00	308.191.500,00	102,73	1.205.000,00
- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	27.146.000,00	28.860.000,00	1.600.000,00	28.360.000,00	104,44	1.205.000,00
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27.145.000,00	28.850.000,00	1.500.000,00	28.350.000,00	104,44	16.960.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	360.000.000,00	367.215.000,00	9.745.000,00	368.960.000,00	104,65	16.960.000,00
12. Sekretariat Daerah	350.000.000,00	357.215.000,00	9.745.000,00	366.960.000,00	104,65	94.680.440,00
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (DALBANG)	160.890.000,00	222.304.440,00	22.876.000,00	245.180.440,00	162,91	(5.797.500,00)
13. Dinas Pelembagaan dan Perikanan	28.000.000,00	19.571.500,00	2.631.000,00	22.202.500,00	79,29	100.477.940,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	122.500.000,00	202.732.940,00	20.245.000,00	222.977.940,00	182,02	52.022.060,00
- Penempatan Lain-lain	616.867.000,00	633.032.099,00	34.946.970,00	667.979.069,00	110,08	40.710.060,00
14. Dinas Perdagangan dan Pasar	327.877.000,00	343.839.090,00	24.847.970,00	368.687.060,00	112,41	8.333.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	175.980.000,00	175.214.000,00	9.099.000,00	184.313.000,00	104,74	2.979.000,00
- Retribusi Jasa Usaha	12.000.000,00	13.979.000,00	1.000.000,00	14.979.000,00	124,83	
- Penempatan Lain-lain	12.000.000,00	13.979.000,00	1.000.000,00	14.979.000,00	124,83	

16 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	168.000.000,00	268.185.010,00	16.438.110,00	272.621.120,00	174,76	116.621.120,00
- Retribusi izin usaha dan tanda daftar usaha hulu	17.500.000,00	28.427.160,00	5.634.000,00	34.061.160,00	194,64	16.581.160,00
- Retribusi izin usaha perdagangan / SIUP	11.150.000,00	8.760.000,00	320.000,00	9.080.000,00	81,43	(2.070.000,00)
- Retribusi izin tempat usaha /SITU	60.000.000,00	81.282.285,00	3.839.125,00	85.121.410,00	141,87	25.121.410,00
- Retribusi izin usaha jasa Kontruksi nasional	6.000.000,00	10.850.000,00	225.000,00	11.075.000,00	184,58	5.075.000,00
- Retribusi izin usaha perdagangan	1.350.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	96,30	(50.000,00)
- Revisi gangguan/HO	60.000.000,00	125.565.565,00	6.417.985,00	131.983.550,00	219,97	71.983.550,00
JUMLAH	31.548.773.047,00	31.781.903.686,00	1.589.207.278,00	33.373.944.244,00	106,78	1.824.171.197,00
UYHD		2.611.200.872,00	7.909.841.777,00	10.601.042.749,00		10.601.042.749,00

Batusangkar, Januari 2010
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET
KAB. TANAH DATAR
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2010
KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2010

No	DINAS / INSTANSI	TARGET 2010 PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN		JUMLAH	%
			s/d 23 Des 2010	24 s/d 31 Des 2010	s/d 31 Des 2010	
			<u>21.968.689.187,00</u>	<u>2.370.765.884,00</u>	<u>24.339.455.071,00</u>	<u>97,89</u>
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	<u>24.862.934.288,00</u>				
	- Pajak Hotel	55.000.000,00	38.485.200,00	3.797.500,00	42.282.700,00	76,88
	- Pajak Restoran	530.000.000,00	404.390.556,00	202.072.833,00	606.463.389,00	114,43
	- Pajak Hiburan	8.500.000,00	9.085.000,00	-	9.085.000,00	106,88
	- Pajak Reklame	105.000.000,00	78.861.753,00	7.192.612,00	86.054.365,00	81,96
	- Pajak Penerangan Jalan	2.925.000.000,00	2.467.418.973,00	1.135.138.580,00	3.602.557.553,00	123,16
	Pajak Pengambilan Galian Golongan C	300.000.000,00	259.688.047,00	25.470.413,00	285.158.460,00	95,05
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	<u>13.497.430.756,00</u>	<u>13.393.836.510,00</u>	-	<u>13.393.836.510,00</u>	<u>99,23</u>
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	<u>13.272.430.756,00</u>	<u>13.281.430.756,00</u>	-	<u>13.281.430.756,00</u>	<u>100,07</u>
	- Perusda Tuah Sepakat	19.000.000,00	28.000.000,00	-	28.000.000,00	147,37
	- BUMD	13.253.430.756,00	13.253.430.756,00	-	13.253.430.756,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	<u>225.000.000,00</u>	<u>112.405.754,00</u>	-	<u>112.405.754,00</u>	<u>49,96</u>
	Bagian Laba Pada BPR	225.000.000,00	112.405.754,00	-	112.405.754,00	49,96
	- Lain-lain PAD Yang Sah	<u>7.442.003.532,00</u>	<u>5.316.923.148,00</u>	<u>997.093.946,00</u>	<u>6.314.017.094,00</u>	<u>84,84</u>
	1. Penerimaan Jasa Giro	<u>3.505.990.000,00</u>	<u>3.891.549.855,00</u>	<u>289.645.384,00</u>	<u>4.181.195.239,00</u>	<u>119,26</u>
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.505.990.000,00	3.891.549.855,00	289.645.384,00	4.181.195.239,00	119,26
	2. Pendapatan Bunga Deposito	<u>2.746.000.000,00</u>	<u>983.312.929,00</u>	<u>26.420.132,00</u>	<u>1.009.733.061,00</u>	<u>36,77</u>
	- Deposito Pada Bank Nagari	2.596.000.000,00	662.137.293,00	17.687.500,00	679.824.793,00	26,19
	- Deposito Pada BPR	150.000.000,00	321.175.636,00	8.732.632,00	329.908.268,00	219,94
	3. Penerimaan Lain-lain	<u>81.040.000,00</u>	<u>26.366.000,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>27.436.000,00</u>	<u>33,85</u>
	- Perusda Tuah Sepakat	22.000.000,00	6.250.000,00	-	6.250.000,00	28,41
	- DPPKA(Pasar Kecamatan/Nagari/ Leges, dll)	59.040.000,00	20.116.000,00	1.070.000,00	21.186.000,00	35,88
	4. Dana Sallak dan Sakortak PB	1.108.973.532,00	-	-	-	-
	5. Penerimaan Lain-lain (Temuan, Denda, LHP, Dll)	PM	415.694.364,00	679.958.430,00	1.095.652.794,00	-
					<u>18.500.000,00</u>	<u>94,87</u>
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	<u>19.500.000,00</u>	<u>18.500.000,00</u>	-		

		19.500.000,00	18.500.000,00		18.500.000,00	94,87
	Penerimaan Lain - Lain	17.460.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	10,31
3	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Pertambangan	17.460.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	10,31
	- Penerimaan Lain - Lain	17.460.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	10,31
		575.000.000,00	162.819.750,00	15.174.100,00	177.993.850,00	30,95
4	Dinas Pekerjaan Umum	300.000.000,00	33.041.500,00	4.496.500,00	37.538.000,00	12,51
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,00	129.778.250,00	10.677.600,00	140.455.850,00	51,07
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					
		5.000.000,00	-	-	-	-
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.000.000,00	-	-	-	-
	- Penerimaan Lain-lain	850.000.000,00	195.349.000,00	132.542.500,00	327.891.500,00	38,58
6	Dinas Kesehatan	850.000.000,00	195.349.000,00	132.542.500,00	327.891.500,00	38,58
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.500.000.000,00	7.475.594.537,00	730.255.734,00	8.205.850.271,00	71,36
7	Rumah Sakit Umum Daerah	11.500.000.000,00	7.475.594.537,00	730.255.734,00	8.205.850.271,00	71,36
	- Pendapatan BLUD					
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	397.000.000,00	398.749.300,00	21.360.500,00	420.109.800,00	105,82
	- Retribusi Parkir	25.000.000,00	27.125.000,00	1.870.000,00	28.995.000,00	115,98
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	275.000.000,00	283.363.300,00	5.294.500,00	288.657.800,00	104,97
	- Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	3.225.000,00	250.000,00	3.475.000,00	34,75
	- Penerimaan Lain-lain	32.000.000,00	56.671.000,00	13.426.000,00	70.097.000,00	219,05
	- Retribusi Terminal	55.000.000,00	28.365.000,00	520.000,00	28.885.000,00	52,52
		150.000.000,00	112.499.166,00	10.096.300,00	122.595.466,00	81,73
9	Badan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	112.499.166,00	10.096.300,00	122.595.466,00	81,73
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					
		330.000.000,00	333.439.000,00	6.221.500,00	339.660.500,00	102,93
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	330.000.000,00	333.439.000,00	6.221.500,00	339.660.500,00	102,93
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	127.000.000,00	22.425.000,00	5.500.000,00	27.925.000,00	21,99
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	127.000.000,00	22.425.000,00	5.500.000,00	27.925.000,00	21,99
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	465.020.000,00	393.100.000,00	9.005.000,00	402.105.000,00	86,47
12	Sekretariat Daerah	375.000.000,00	327.505.000,00	6.945.000,00	334.450.000,00	89,19
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (DALBANG)	71.520.000,00	62.595.000,00	2.060.000,00	64.655.000,00	90,40
	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Bagian Umum)	18.500.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	16,22
	Angsuran/Cicilan Penjualan kendaraan (Bagian Umum)	5.500.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	43,64
13	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian	5.500.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	43,64
	- Penerimaan Lain-lain	165.500.000,00	226.660.250,00	59.262.939,00	285.923.189,00	172,76
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	36.000.000,00	23.902.500,00	1.809.000,00	25.711.500,00	71,42
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	129.500.000,00	202.757.750,00	57.453.939,00	260.211.689,00	200,94
	- Penerimaan Lain-lain					

		622.480.000,00	567.241.550,00	28.963.440,00	596.204.990,00	95,78
15	Dinas Perdagangan dan Pasar	375.000.000,00	424.079.750,00	25.455.440,00	449.535.190,00	119,88
	- Retribusi Pelayanan Pasar	247.480.000,00	143.161.800,00	3.508.000,00	146.669.800,00	59,27
	- Retribusi Jasa Usaha	310.000.000,00	401.818.695,00	7.973.410,00	409.792.105,00	132,19
16	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	35.000.000,00	72.342.967,00	2.550.210,00	74.693.177,00	213,98
	Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha	20.000.000,00	13.707.400,00	80.000,00	13.787.400,00	68,94
	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	90.000.000,00	101.266.618,00	1.143.200,00	102.409.818,00	113,79
	Retribusi Izin Tempat usaha (SITU)	15.000.000,00	11.354.100,00		11.354.100,00	75,69
	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	50.000.000,00	41.121.500,00	680.000,00	41.801.500,00	83,60
	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	100.000.000,00	162.026.110,00	3.520.000,00	165.546.110,00	165,55
	Retribusi Gangguan / HO	40.402.394.288,00	32.281.085.435,00	3.397.121.307,00	35.678.206.742,00	88,31
	J U M L A H		3.250.615.824,00	4.132.928.815,00	7.383.544.639,00	
	U Y H D	40.402.394.288,00	35.531.701.259,00	7.530.050.122,00	43.061.751.381,00	

Batusangkar, Desember 2010
 AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET
 KAB. TANAH DATAR
 KASIBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



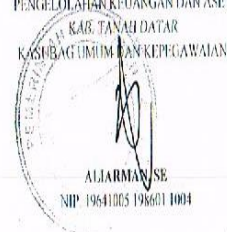
ALI ARMAN, SE
 NIP. 19641005 198601 1004

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2011
KEADAAN S/D 30 DESEMBER 2011

No	DINAS / INSTANSI	TARGET 2011 PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN		JUMLAH s/d Desember 2011	%
			Bulan Nov 2011	Bulan Des 2011		
1	Dinas Pendidikan Pengelolaan Keuangan dan Aset	35.210.626.199,27	33.787.885.478,00	3.611.823.144,00	37.399.708.622,00	105,69
	- Pajak Hotel	37.019.407,37	20.948.621,00	11.823.051,00	32.771.672,00	87,99
	- Pajak Restoran	511.318.900,00	451.354.425,00	197.295.371,00	648.650.796,00	106,11
	- Pajak Hiburan	4.473.940,18	1.400.000,00	-	1.400.000,00	31,31
	- Pajak Reklame	116.773.376,49	35.451.545,00	7.646.900,00	43.098.445,00	36,91
	- Pajak Penerangan Jalan	3.302.557.553,00	2.546.944.415,00	1.524.065.265,00	4.071.009.680,00	123,94
	- Pajak Penghasilan/Gajeri Golongan C	209.318.341,20	138.955.473,00	74.045.127,00	213.000.600,00	73,62
	- Pajak Besi Perakahan Hak atas Tanah dan Bangunan	400.000.000,00	5.700.000,00	28.716.000,00	34.416.000,00	8,60
	- Pajak Air Tanah	47.000.000,00	-	-	-	0,00
	Hati-hati Penyelidikan Kikayan Daerah Yang Dipisahkan	22.384.086.118,40	22.377.083.463,00	10.000.000,00	22.387.083.463,00	100,15
	Bantuan Laba Atas Penyelidikan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	22.138.236.342,40	22.096.748.367,00	10.000.000,00	22.106.748.367,00	99,86
	- Perwujudan Teah Sepakat	41.477.385,40	-	10.000.000,00	10.000.000,00	24,11
	- BUMD	22.096.748.957,00	22.096.748.367,00	-	22.096.748.367,00	100,00
	Bantuan Laba Atas Penyelidikan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	215.838.716,00	201.834.506,00	-	201.834.506,00	93,51
	Bantuan Lain Pada BPR	215.838.716,00	201.834.506,00	-	201.834.506,00	93,51
	- Lain-lain PAD Yang Sah	2.828.003.361,80	7.816.618.532,00	1.688.461.743,00	9.405.080.275,00	333,83
1.	Penerimaan Jasa Giro	3.193.452.862,40	2.633.269.629,00	180.195.141,00	2.813.464.770,00	87,96
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.193.452.862,40	2.633.269.629,00	180.195.141,00	2.813.464.770,00	87,96
2.	Pendapatan Bunga Deposito	4.645.619.811,20	4.086.915.664,00	544.713.903,00	4.631.629.567,00	99,93
	- Deposito Pada Bank Nagari	4.280.615.465,20	3.622.942.115,00	518.205.982,00	4.141.148.097,00	96,77
	- Deposito Pada BPR	264.953.815,20	241.773.549,00	26.508.326,00	268.281.875,00	101,28
3.	Penerimaan Lain-lain	84.977.033,00	7.380.850,00	-	7.380.850,00	8,70
	- Perwujudan Teah Sepakat	-	-	-	-	0,00
	- DPPKA	84.977.033,00	7.380.850,00	-	7.380.850,00	8,70
4.	Penerimaan Lain-lain (Termasuk Denda, LHP, Dll)	PM	1.109.282.189,00	633.402.591,00	1.042.754.780,00	-
2.	Kantor Lingkungan Hidup	149.900.000,00	193.967.600,00	28.583.200,00	129.648.000,00	86,42
	- Retribusi Pelayanan Pemasangan Kebersihan	149.900.000,00	103.657.500,00	25.683.810,00	129.341.310,00	86,42
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	11.310.663.226,96	8.274.019.025,00	2.080.965.247,00	10.354.984.272,00	91,99
	- Pendapatan BLUD	11.310.663.226,96	8.274.019.025,00	2.080.965.247,00	10.354.984.272,00	91,99
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	169.788.000,00	296.157.000,00	61.683.900,00	357.840.900,00	209,23
	- Retribusi Pasar / Citra	99.608.000,00	116.370.000,00	11.728.000,00	128.098.000,00	128,38
	- Retribusi Pemeliharaan Pagar Hewan	70.768.000,00	57.485.000,00	5.325.000,00	62.810.000,00	87,74
	- Penerimaan Lain-lain	-	122.291.500,00	35.830.900,00	158.122.400,00	100,00
5.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	265.859.000,00	391.297.400,00	46.676.600,00	437.974.000,00	122,74
	- Retribusi Parkir	23.800.000,00	27.510.000,00	5.185.000,00	32.695.000,00	119,62
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	291.575.000,00	263.907.000,00	28.105.500,00	312.012.500,00	107,01
	- Retribusi Terminal	30.848.000,00	25.580.000,00	2.705.000,00	28.285.000,00	92,28
	- Retribusi Iklan Trayek	5.076.000,00	4.576.100,00	215.000,00	5.185.000,00	102,15
	- Penerimaan Lain-lain	-	49.436.000,00	8.470.000,00	58.906.000,00	109,60
6.	Dinas Pekerjaan Umum	33.000.000,00	167.676.500,00	27.865.500,00	195.542.000,00	410,49
	- Retribusi Pemeliharaan Kelayakan Daerah	33.000.000,00	167.676.500,00	27.865.500,00	195.542.000,00	410,49
7.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Perambangan & Pasar	297.295.600,00	424.473.418,00	71.044.010,00	495.517.428,00	132,71
	- Retribusi Pelayanan Pasar	379.716.500,00	390.815.430,00	52.521.000,00	443.336.430,00	116,74
	- Retribusi Jasa Usaha	12.580.000,00	14.657.988,00	17.816.000,00	32.473.988,00	259,81

- Perencanaan Lainnya		13.166.000,00	290.900,00	13.866.000,00	180,00
3 Dinas Kesehatan	3.314.017.200,00	862.377.843,00	731.510.054,00	1.144.327.937,00	34,83
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.314.017.200,00	862.377.843,00	291.950.005,00	1.144.327.937,00	34,83
9 Dinas Koperasi dan Cipta Sipta	256.000.000,00	214.464.000,00	153.604.000,00	187.598.000,00	152,16
- Retribusi Pengambilan Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	256.000.000,00	214.464.000,00	153.594.000,00	187.598.000,00	152,16
10 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	336.480.835,00	238.151.415,00	28.621.838,00	326.749.285,00	106,41
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	147.410.575,00	121.522.975,00	33.402.330,00	154.925.305,00	105,29
- Retribusi Garis-garis PLO	158.320.260,00	154.638.440,00	4.658.100,00	189.354.090,00	106,97
- Retribusi Izin Usaha Perdagangan (S U P)	-	1.969.000,00	-	1.969.000,00	100,00
11 Dinas Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.623.600,00	16.450.000,00	7.100.000,00	23.160.000,00	59,81
- Retribusi Temporal Rekreasi dan Olahraga	34.623.600,00	16.450.000,00	7.100.000,00	23.160.000,00	59,81
12 Sekretariat Daerah	432.216.326,00	381.132.827,00	10.186.000,00	311.317.627,00	236,46
- Retribusi Pengambilan Biaya Cetak Peta (Bay. Dalbar)	-	-	735.000,00	735.000,00	100,00
- Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah (Bagian Urutan)	67.158.000,00	100.025.700,00	6.150.000,00	112.179.700,00	128,50
- Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan (Bagian Umum)	45.047.226,00	155.102.827,00	3.300.000,00	159.402.827,00	442,43
J U M L A H	51.823.186.587,33	46.070.041.863,00	6.326.793.445,00	51.404.840.313,00	99,19
Uy: D		355.010.555,00	0.300.820.344,00	8.695.941.639,00	
	51.823.186.587,33	46.425.052.418,00	14.627.723.789,00	60.100.781.952,00	

Katungkar, Januari 2012
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KAB. TANAH DATAR
KASUBAGUM HUKUM DAN KEPERCAYAAN



DAFTAR TARGET DAN REALISASI PEMERINTAH PAD 2012
 REALISASI SD 31 DESEMBER 2012

No	DINAS/INSTANSI	TARGET PERUBAHAN 2011	REALISASI PEMERINTAH		JUNJAH sd. 31 Des 2012	%
			sd November	Desember		
1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	31.858.441.285,00	33.729.203.816,53	1.841.453.971,00	35.589.657.785,53	109,68
	- Pajak Hotel	76.829.585,00	89.422.542,00	5.349.000,00	94.771.542,00	123,25
	- Pajak Restoran	712.738.159,00	441.845.946,00	324.108.081,00	766.014.027,00	107,47
	- Pajak Hiburan	16.236.300,00	3.867.106,00	-	6.857.100,00	42,28
	- Pajak Reklame	127.583.985,00	65.491.771,00	18.291.800,00	113.823.571,00	89,11
	- Pajak Penerangan Jalan	4.557.233.900,00	4.364.152.465,00	448.889.760,00	4.813.042.225,00	105,44
	- Pajak Parkir	5.000.000,00	-	-	-	0,00
	- Pajak Air Tanah	68.000.000,00	74.316.517,00	11.283.868,00	85.600.413,00	142,67
	- Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	0,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	316.643.750,00	299.009.050,00	112.267.758,00	382.116.808,00	119,77
	- Eke. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	210.000.000,00	339.479.000,00	246.716.250,00	559.195.250,00	265,81
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.193.440.235,00	20.634.613.811,00	-	20.634.613.811,00	97,38
	Dana/BUMD	21.016.989.719,00	20.638.848.136,00	-	20.638.848.136,00	98,21
	- Perasua Tush Sepatol	371.050.585,00	-	-	-	0,00
	- BUMD	20.639.849.136,00	20.638.848.136,00	-	20.638.849.136,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	184.530.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,55
	- Bagian Laba Pada BPR	184.530.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,55
	Lain-lain PAD Yang Sah	6.575.257.840,00	7.242.119.892,53	680.637.388,00	7.922.740.280,53	120,48
	1. Pemukiman Jasa Giro	3.094.892.447,00	3.945.270.335,00	229.060.850,00	3.144.331.484,00	101,60
	- Jasa Giro Kasa Daerah	3.094.892.447,00	2.915.270.335,00	229.060.850,00	3.144.331.484,00	101,60
	2. Pendapatan Bunga Deposito	3.481.465.393,00	3.630.855.392,00	418.211.329,00	3.948.296.321,00	113,41
	- Deposito Pada Bank Nagari	3.375.000.000,00	3.341.162.077,00	403.334.965,00	3.744.497.042,00	110,95
	- Deposito Pada BPR	108.455.393,00	168.920.315,00	14.906.334,00	293.828.646,00	191,47
	3. Penekanan Lain-lain (Taman, Denda, UHP, dll)	PM	798.756.161,53	33.385.200,00	830.120.361,53	102,00
2	Kantor Lingkungan Hidup	211.470.000,00	113.996.548,00	32.281.600,00	146.198.048,00	69,12
	- Retribusi Pelayanan Pemangrehatan/Kebersihan	181.470.000,00	113.996.548,00	32.281.600,00	146.198.048,00	80,55
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	-	-	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.449.900.000,00	11.017.532.822,00	1.554.230.322,00	12.571.763.144,00	93,47
	- Pendapatan BLUD	13.449.900.000,00	11.017.532.822,00	1.554.230.322,00	12.571.763.144,00	93,47
4	Dinas Pemukiman dan Perikanan	317.800.000,00	367.512.000,00	68.631.000,00	436.143.000,00	134,84
	- Retribusi Pasar Gasek/Perikanan	175.750.000,00	221.175.000,00	17.090.000,00	238.295.000,00	135,56
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	141.840.000,00	120.902.000,00	17.145.000,00	137.947.000,00	97,28
	- Pemukiman Lain-lain	20.210.000,00	25.435.000,00	34.400,00	52.081.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	575.270.000,00	530.997.188,00	419.163.959,00	850.181.319,00	165,17
	- Retribusi Parkir	70.000.000,00	39.955.000,00	16.310.000,00	47.265.000,00	67,44
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	318.720.000,00	315.035.000,00	28.492.800,00	341.848.000,00	107,19
	- Retribusi Merata Telekomunikasi	77.000.000,00	117.197.160,00	353.791.159,00	476.889.319,00	611,56
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43.698.000,00	28.670.000,00	19.696.000,00	48.366.000,00	104,13
	- Retribusi Terminal	38.330.000,00	28.625.000,00	5.140.000,00	33.965.000,00	88,38
	- Retribusi Izin Trayek	26.575.000,00	10.385.000,00	625.000,00	11.010.000,00	41,43
6	Dinas Pekerjaan Umum	260.000.000,00	197.383.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00	197.383.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
7	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Perimbangan dan Pasar	828.821.800,00	465.549.820,00	55.865.170,00	521.404.990,00	62,32
	- Retribusi Pelayanan Pasar	818.340.000,00	435.372.800,00	38.626.800,00	473.999.600,00	75,88
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.828.400,00	480.000,00	-	480.000,00	3,74
	- Retribusi Pasar Gasek/Perikanan	199.653.900,00	33.897.220,00	17.228.240,00	50.915.460,00	25,71
8	Dinas Kesehatan	2.336.160.000,00	1.635.040.036,00	686.981.310,00	2.322.021.415,00	99,21

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KADUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013
KEADAAN BULAN DESEMBER 2013

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah	<u>83.106.402.876,46</u>	<u>56.647.721.864,29</u>	<u>5.550.598.575,00</u>	<u>62.198.420.439,29</u>	<u>98,68</u>	
4 1	Pendapatan Asli Daerah	<u>8.774.156.646,00</u>	<u>6.252.509.729,83</u>	<u>1.607.288.934,00</u>	<u>7.859.798.663,83</u>	<u>90,03</u>	
4 1 1	Pajak Daerah	<u>208.220.180,00</u>	<u>76.620.249,00</u>	<u>27.156.000,00</u>	<u>103.776.249,00</u>	<u>49,84</u>	
4 1 1 01	Pajak Hotel	<u>169.340.180,00</u>	<u>38.055.700,00</u>	<u>11.279.000,00</u>	<u>49.344.700,00</u>	<u>29,14</u>	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	<u>38.890.000,00</u>	<u>38.654.540,00</u>	<u>15.890.000,00</u>	<u>54.434.540,00</u>	<u>140,01</u>	
4 1 1 01 06	Hotel Melati Dua	<u>807.806.000,00</u>	<u>597.024.439,00</u>	<u>287.406.529,00</u>	<u>884.609.967,00</u>	<u>109,52</u>	
4 1 1 02	Pajak Restoran	<u>40.518.000,00</u>	<u>16.634.080,00</u>	<u>4.096.800,00</u>	<u>20.730.880,00</u>	<u>41,36</u>	
4 1 1 02 01	Restoran	<u>750.089.000,00</u>	<u>550.568.359,00</u>	<u>283.309.829,00</u>	<u>833.878.287,00</u>	<u>110,00</u>	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	<u>21.760.000,00</u>	<u>1.721.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.721.100,00</u>	<u>7,93</u>	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	<u>3.000.000,00</u>	<u>821.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>821.100,00</u>	<u>27,37</u>	
4 1 1 03 15	Pecinan Kuda	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 17	Penmainan Kolangkasari	<u>8.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 19	Mandi Uap/Spa	<u>5.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 19	Pusat Kebudayaan	<u>4.500.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>20,00</u>	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	<u>162.825.830,00</u>	<u>96.731.635,00</u>	<u>12.039.869,00</u>	<u>108.771.504,00</u>	<u>66,81</u>	
4 1 1 04	Pajak Reklame	<u>146.013.711,00</u>	<u>70.470.535,00</u>	<u>12.039.869,00</u>	<u>82.510.404,00</u>	<u>56,51</u>	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	<u>15.061.119,00</u>	<u>10.261.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.261.100,00</u>	<u>68,19</u>	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	<u>751.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	<u>5.066.618.181,00</u>	<u>4.728.637.049,00</u>	<u>482.674.088,00</u>	<u>5.209.511.137,00</u>	<u>102,82</u>	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	<u>5.066.618.181,00</u>	<u>4.728.637.049,00</u>	<u>482.674.088,00</u>	<u>5.209.511.137,00</u>	<u>102,82</u>	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	<u>12.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 06	Pajak Parkir	<u>12.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	<u>134.133.720,00</u>	<u>146.376.502,00</u>	<u>19.957.492,00</u>	<u>165.333.994,00</u>	<u>123,26</u>	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	<u>134.133.720,00</u>	<u>146.376.502,00</u>	<u>19.957.492,00</u>	<u>165.333.994,00</u>	<u>123,26</u>	
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah	<u>328.418.750,00</u>	<u>279.908.849,93</u>	<u>181.696.413,00</u>	<u>461.413.262,93</u>	<u>140,50</u>	
4 1 1 09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<u>7.666.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 09 06	Marmer	<u>79.762.500,00</u>	<u>129.974.143,93</u>	<u>110.487.186,00</u>	<u>240.461.331,93</u>	<u>301,47</u>	
4 1 1 09 07	Pasir/Korail	<u>238.500.000,00</u>	<u>112.143.146,00</u>	<u>63.680.391,00</u>	<u>165.724.137,00</u>	<u>70,07</u>	
4 1 1 09 08	Granit/Andasit/Batu Beku	<u>4.500.000,00</u>	<u>31.789.660,00</u>	<u>17.438.234,00</u>	<u>49.227.894,00</u>	<u>1.116,29</u>	
4 1 1 09 09	Tanah Liat	<u>1.772.413.065,00</u>	<u>22.376.307,00</u>	<u>484.028.793,00</u>	<u>506.408.100,00</u>	<u>28,57</u>	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<u>75.346.840,00</u>	<u>22.376.307,00</u>	<u>484.028.793,00</u>	<u>506.408.100,00</u>	<u>672,11</u>	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	<u>1.697.067.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>193,94</u>	
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>193,94</u>	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>193,94</u>	

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 2	Retribusi Daerah	7.244.673.212,00	5.523.990.755,28	1.141.117.873,00	6.665.098.628,28	92,09	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	5.612.377.462,00	4.133.626.285,00	489.807.175,00	4.633.433.460,00	84,08	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.662.587.062,00	2.500.150.140,00	240.614.740,00	2.740.764.890,00	74,63	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	292.520.000,00	142.482.500,00	20.874.000,00	163.356.500,00	55,84	
4 1 1 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	149.716.000,00	283.015.000,00	24.505.000,00	307.520.000,00	206,40	
4 1 1 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	89.060.000,00	49.070.000,00	21.430.000,00	70.500.000,00	79,16	
4 1 1 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	669.740.400,00	490.849.270,00	60.193.490,00	551.042.760,00	79,69	
4 1 1 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	351.360.000,00	340.558.600,00	35.899.200,00	376.457.800,00	107,14	
4 1 1 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.280.000,00	2.565.000,00	45.000,00	2.640.000,00	115,79	
4 1 1 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.875.000,00	4.095.000,00	480.000,00	4.575.000,00	244,00	
4 1 1 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan limbah	9.240.000,00	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	140,04	
4 1 1 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	264.000.000,00	307.870.775,00	95.755.745,00	403.626.520,00	152,89	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.309.046.750,00	747.182.220,00	582.664.890,00	1.329.847.100,00	101,69	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kikayaan Daerah	846.437.150,00	394.512.500,00	273.434.740,00	673.947.240,00	79,62	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Persewaan	190.853.600,00	159.861.720,00	33.862.220,00	193.723.940,00	101,62	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	31.695.000,00	28.150.000,00	5.054.000,00	33.204.000,00	104,76	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	149.760.000,00	113.510.000,00	10.035.000,00	123.545.000,00	84,18	
4 1 2 02 08	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	93.500.000,00	51.148.000,00	254.256.000,00	305.404.000,00	326,64	
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	423.258.000,00	643.142.250,28	58.646.738,00	701.789.000,28	166,81	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	282.324.830,28	21.797.666,00	304.122.516,28	152,06	
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	210.000.000,00	354.907.420,00	33.048.050,00	387.955.470,00	184,74	
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Toyok	13.258.000,00	5.913.000,00	3.800.000,00	9.713.000,00	73,28	
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.376.889.921,46	23.528.134.407,00	0,00	23.528.134.407,00	96,52	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Perus. Mlk Daerah	24.223.467.835,46	23.370.353.121,00	0,00	23.370.353.121,00	96,46	
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	660.861.714,46	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00	0,90	
4 1 3 01 02	BLUD	23.362.616.121,00	23.362.616.121,00	0,00	23.362.616.121,00	100,00	
4 1 3 01 03	Bgn. Laba atas Perus. Modal pd Perus. Mlk Swasta	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 3 01 03 01	Bagian Laba Pada BPR	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.710.872.287,00	21.303.127.002,07	2.802.291.788,00	24.105.418.770,07	106,14	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	3.956.785.532,00	3.442.261.238,00	161.157.918,00	3.603.419.156,00	91,09	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.956.785.532,00	3.442.261.238,00	161.157.918,00	3.603.419.156,00	91,09	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	4.903.389.159,00	4.408.769.778,00	638.722.507,00	5.045.509.285,00	102,80	
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Negeri	4.903.389.159,00	4.408.769.778,00	638.722.507,00	5.045.509.285,00	102,80	
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	51.287.606,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	13,81	
4 1 4 13 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Colongan II	6.360.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	45.047.226,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	15,76	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	0,00	870.938.447,07	1.002.710.589,00	1.873.638.035,07	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain (standar/HPK/)	0,00	970.938.447,07	1.002.700.569,00	1.973.638.035,07	100	
4 1 4 16	Pendapatan BLUD	13.800.190.000,00	12.473.040.539,00	1.002.710.755,00	13.475.751.294,00	97,65	
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	13.800.190.000,00	12.473.040.539,00	1.002.710.755,00	13.475.751.294,00	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERIMBANGAN	658.866.232.427,00	649.309.446.458,00	17.782.424.048,00	658.091.880.507,00	100,00	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	17.190.023.427,00	12.876.243.458,00	4.339.452.048,00	17.215.701.507,00	100,15	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	15.852.094.147,00	12.155.254.845,00	4.086.202.108,00	16.241.466.753,00	101,81	
4 2 1 01 01	a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.852.094.147,00	12.155.254.845,00	4.086.202.108,00	16.241.466.753,00	101,81	
4 2 1 01 01 01	- PBB Pagar/Pertanian	9.774.959.461,00	8.405.815.528,00	2.887.743.884,00	11.293.679.512,00	115,54	
4 2 1 01 01 02	- PBB Sektor Pertambangan Migas	6.723.777.229,00	9.247.359,00	2.809.716.308,00	11.067.066.311,00	164,45	
	- DBH Sektor Pertambangan Migas	8.606.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- DBH PBB Sektor Perkebunan	2.855.143.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 01 01 03	- PBB Bagi Hasil Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Insentive Emas PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 01 01 05	- DBH BP PBB	187.142.272,00	158.565.525,00	78.047.676,00	236.613.201,00	126,43	
4 2 1 01 02	b. Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPON) dan PPh Pasal 21	5.824.247.898,00	3.494.548.614,00	1.039.971.967,00	4.564.520.611,00	78,37	
4 2 1 01 04	c. Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	352.885.908,00	254.800.500,00	128.466.127,00	383.266.627,00	108,61	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.137.929.280,00	720.984.813,00	253.249.941,00	974.234.754,00	100,00	
4 2 1 02 01	a. Bagi Hasil Dari PSDH	167.962.872,00	123.023.038,00	0,00	123.023.038,00	73,27	
1 2 1 02 03	b. Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	112.944,00	148.104,00	13.912.711,00	14.060.815,00	12,432,52	
4 2 1 02 04	c. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	9.928.900,00	859.430,00	0,00	859.430,00	8,65	
4 2 1 02 05	d. Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	749.645.200,00	18.472.837,00	81.922.633,00	100.395.530,00	13,39	
4 2 1 02 06	e. Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	289.738.431,00	250.629.395,00	95.579.478,00	347.408.873,00	118,90	
4 2 1 02 10	f. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap Panas Bumi (Royalti)	20.600.533,00	20.600.533,00	26.004.000,00	46.604.533,00	226,67	
4 2 1 02 11	g. Bagi Hasil Dari Iuran Kuasa Pertambangan	0,00	307.062.446,00	34.741.110,00	341.753.556,00	100,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	587.104.249.000,00	587.104.249.000,00	0,00	587.104.249.000,00	100,00	
4 2 2 01	- Dana Alokasi Umum	587.104.249.000,00	587.104.249.000,00	0,00	587.104.249.000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	53.771.930.000,00	40.328.948.000,00	13.442.932.000,00	53.771.930.000,00	100,00	
4 2 3 01	- Dana Alokasi Khusus	53.771.930.000,00	40.328.948.000,00	13.442.932.000,00	53.771.930.000,00	100,00	
4 3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	173.897.084.101,00	148.279.185.400,00	893.937.800,00	148.173.173.200,00	85,78	
4 3 1	Pendapatan Hibah	1.843.580.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	6,53	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.823.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 1 01 01	Pemerintah	1.823.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	120.000.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	100,90	
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	120.000.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	100,90	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	22.562.388.381,00	8.082.832.000,00	0,00	8.082.832.000,00	35,82	
4 3 3 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	22.562.388.381,00	8.082.832.000,00	0,00	8.082.832.000,00	35,82	
4 3 3 01 01	a. Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.673.039.516,00	2.513.804.000,00	0,00	2.513.804.000,00	44,31	
4 3 3 01 02	b. Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.785.254.571,00	2.120.546.000,00	0,00	2.120.546.000,00	36,59	
4 3 3 01 03	c. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.826.589.699,00	3.268.332.400,00	0,00	3.268.332.400,00	31,96	
4 3 3 01 04	d. Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	1.067.682.205,00	241.948.600,00	0,00	241.948.600,00	22,65	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otomod Khusus	140.083.462.000,00	140.083.462.000,00	0,00	140.083.462.000,00	100,00	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	140.083.462.000,00	140.083.462.000,00	0,00	140.083.462.000,00	100,00	
4 3 4 01 03	- Dana Tambahan Penghasilan & Tunj Profesi Guru	140.083.462.000,00	3.163.500.000,00	0,00	5.163.500.000,00	3,59	
4 3 4 01 05	- Tunjangan Profesi Guru	0,00	134.918.962.000,00	0,00	134.918.962.000,00	100,00	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Sumbat	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	JUMLAH (4.2 + 4.3)	651.873.265.528,00	788.589.631.858,00	18.675.421.849,00	807.265.053.707,00	97,03	
	TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3)	656.079.668.804,46	845.230.353.752,28	24.227.120.424,00	869.463.474.176,28	97,14	

Bulan: Desember 2013
 AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGUKULAN & PENGENDALIAN ASET
 KAB. TANJUNGPINANG
 SURABAGUMUDIN
 ALJARMAN, SE

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014
KEADAAN BULAN DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	97.329.727,00	88.012.162,89	11.738.338,14	99.750.501,03	102,49	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.167.541,48	8.015.716,35	4.442.516,73	12.458.233,08	102,31	
4 1 1	Pajak Daerah	275.421,12	81.886,68	1.980,00	83.873,68	30,38	
4 1 1 01	Pajak Hotel	212.108,12	39.145,00	812,50	39.957,50	18,84	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	63.312,00	42.551,19	1.167,50	43.718,69	69,05	
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1.050,00	593,00	443,26	1.036,26	98,70	
4 1 1 02	Pajak Restoran	66.700,00	15.742,77	0,00	15.742,77	23,60	
4 1 1 02 01	Restoran	663.240,00	577.333,73	443.265,16	1.020.598,89	153,75	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	25.500,00	9.148,20	0,00	9.148,20	35,87	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 13	Pasukan Karo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 15	Pemakaian Kelengkapan	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 18	Pasati Kebudayaan	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	66,67	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	248.332,40	98.420,14	24.143,55	122.563,69	49,32	
4 1 1 04	Pajak Reklame	226.250,00	95.401,93	23.643,65	119.045,58	52,82	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Wisconsin/Magelan	15.951,00	4.018,16	489,60	4.507,76	28,31	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 03	Reklame Melati/Siker	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 05	Reklame Bapasan	7.112.979,41	5.410.400,43	915.494,69	6.325.895,12	88,92	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	7.112.979,41	5.410.400,43	515.464,69	5.925.865,12	83,31	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06	Pajak Parkir	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	189.714,58	121.773,19	11.448,03	133.221,22	69,82	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	159.714,58	121.773,19	11.448,03	133.221,22	83,52	
4 1 1 07 01	Pajak Air Bawah Tanah	401.819,00	407.090,70	198.667,85	605.758,55	150,77	
4 1 1 09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.437,00	71.975,22	0,00	71.975,22	113,46	
4 1 1 09 06	Marmar	119.125,00	132.913,24	79.336,97	212.250,21	178,23	
4 1 1 09 07	Pasir/Kerikil	163.592,00	145.362,74	74.026,31	219.389,05	134,08	
4 1 1 09 08	Granit/Andesit/Batu Beku	39.825,00	56.539,09	35.141,99	91.681,08	230,21	
4 1 1 09 09	Tanah Liat	2.233.091,68	1.609.483,28	240.249,89	1.849.733,17	82,83	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan	2.233.091,68	1.609.483,28	240.249,89	1.849.733,17	82,83	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	630.000,00	281.819,69	17.360,00	300.179,69	47,71	
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000,00	281.819,69	17.360,00	300.179,69	47,71	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000,00	281.819,69	17.360,00	300.179,69	47,71	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
		11.719.184.470,00	10.419.128.683,00	1.220.681.133,00	11.639.719.984,00	99,32	
4 1 2	Retribusi Daerah	7.737.133.433,00	6.707.385.019,00	697.747.840,00	7.405.132.859,00	96,48	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	5.748.706.030,00	4.811.056.000,00	552.382.000,00	5.363.438.000,00	89,82	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	194.765.000,00	40.165.000,00	234.930.000,00	64,28	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemakaman/Kebekalan	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	23.405.000,00	100,00	
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	32.846.000,00	56.510.000,00	16.550.000,00	67.060.000,00	106,54	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	724.194.400,00	682.196.400,00	48.472.940,00	740.669.340,00	105,18	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	376.800.000,00	354.447.800,00	39.908.000,00	394.355.800,00	104,66	
4 1 2 01 07	Retribusi Pengalihan Kendaran Bermotor	3.328.000,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	93,22	
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.700.000,00	2.520.000,00	240.000,00	2.760.000,00	47,92	
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	12.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	36,67	
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan kelas	450.000.000,00	340.640.819,00	0,00	340.640.819,00	75,69	
4 1 2 01 13	Retribusi Merasa Telekomunikasi	3.478.051.040,00	3.068.189.824,00	462.094.240,00	3.528.284.064,00	101,44	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.037.581.040,00	573.635.314,00	112.090.000,00	686.825.314,00	68,16	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	239.890.000,00	18.732.240,00	258.622.240,00	127,61	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	33.460.000,00	25.523.000,00	3.120.000,00	32.643.000,00	97,57	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	149.880.000,00	103.105.000,00	8.920.000,00	112.025.000,00	74,74	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Posing Hewan	2.128.011.500,00	2.128.011.500,00	315.332.000,00	2.443.343.500,00	118,70	
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	594.000.000,00	585.892.830,00	60.869.251,00	646.762.081,00	108,25	
4 1 2 03	Retribusi Pelayanan Tertentu	280.000.000,00	237.215.100,00	38.567.631,00	375.782.731,00	134,21	
4 1 2 03 01	Retribusi dan Modifikasi Bangunan	236.000.000,00	230.372.720,00	21.867.220,00	311.499.940,00	132,64	
4 1 2 03 03	Retribusi dan Gengguan Kersamaan	9.000.000,00	6.005.000,00	1.125.000,00	7.130.000,00	101,44	
4 1 2 03 04	Retribusi lain-lain	23.417.592.534,00	23.417.592.534,00	1,00	23.417.592.534,00	100,00	
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.283.848.878,00	23.283.404.878,00	1,00	23.283.404.878,00	100,00	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Penye. Modal Pd Perus. Mkt Daerah	7.000.000,00	6.558.000,00	0,00	6.558.000,00	93,83	
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	23.276.848.878,00	23.276.848.878,00	1,00	23.276.848.878,00	100,00	
4 1 3 01 02	Bank Negeri	133.746.969,00	133.746.969,00	0,00	133.746.969,00	100,00	
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Penus. Modal pd Perus. Mkt Swasta	128.938.966,00	128.938.966,00	0,00	128.938.966,00	100,00	
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada DPR	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	100	
4 1 3 03 02	BMT	60.006.408.962,00	46.166.866.869,00	8.975.186.102,00	55.236.334.969,00	112,46	
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.200.000,00	72.675.000,00	14.335.800,00	87.010.800,00	270,22	
4 1 4 1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Pemukiman	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100	
4 1 4 01 06	Penjualan Kencanaan Diras Roda 4	0,00	40.175.000,00	14.335.000,00	54.510.000,00	100	
4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	4.682.904.002,00	4.379.322.873,00	301.807.389,00	4.681.130.659,00	99,96	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	4.682.904.002,00	4.379.322.873,00	301.807.389,00	4.681.130.659,00	99,96	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kes Daerah	6.177.862.500,00	6.673.468.339,00	744.968.118,00	7.418.336.454,00	120,09	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.177.862.500,00	6.673.468.339,00	744.968.118,00	7.418.336.454,00	120,09	
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cikilan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13 1	Angsuran/Cikilan Penjualan Rumah Daerah Golongan III	39.112.422.000,00	36.034.700.833,63	8.014.156.969,00	43.048.857.803,63	110,09	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-lain	0,00	1.013.569.689,69	204.651.354,00	1.218.221.043,69	100	
4 1 4 15 01	Denda	0,00	11.320.685,69	59.122.144,00	70.442.830,69	100	
	LHP	0,00	694.163.200,55	169.683.727,00	863.846.927,55	100	
	LHPG	0,00	36,00	631.302,00	631.338,00	100	
	-Pengembalian DIB	0,00	17.232,00	4.485.038,00	4.502.270,00	100	
	-Penerimaan Lain-lain	0,00	437.813.445,63	33.729.101,00	471.542.546,63	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Diwakilkan	0,00	381.732.209,00	12.803.000,00	394.535.209,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Direvisi	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Setoran	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100	
4 1 4 15 02	Pendapatan B.L/D Rumah Sakti Unwan Daerah	30.700.000.000,00	28.292.238.854,00	6.739.505.644,00	33.031.744.498,00	107,60	
4 1 4 15 04	Pendapatan Dana Koperasi JKN pada FKTP Mkt Pemerintah	6.412.422.000,00	2.356.639.000,00	1.036.859.000,00	3.393.498.000,00	100,04	

KODE REKEMING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERMBANGAN	727.346.898.825,00	707.991.138.495,00	20.280.613.824,00	728.171.773.419,00	100,13	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Bukan Pajak)	15.977.841.825,00	11.748.436.465,00	5.054.198.824,00	16.802.625.419,00	105,82	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	13.072.383.964,00	9.749.282.267,00	4.895.910.904,00	14.645.312.925,00	112,03	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.878.380.274,00	5.855.393.915,00	2.580.219.504,00	8.272.813.119,00	120,27	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 NPWP dan PPh	3.723.467.673,00	3.874.773.269,00	2.600.809.163,00	5.375.583.140,00	100	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Tembakau	470.538.217,00	188.214.466,00	303.591.821,00	497.116.307,00	105,65	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	2.806.468.632,00	1.919.094.423,00	159.298.418,00	2.157.312.844,00	76,90	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Iuran Izin Pemukiman Hidran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 01 01	Bagi Hasil dari Iuran Izin Pemukiman Hidran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Perizinan Sumber Daya Alam Kehutanan	402.819.198,00	291.986.764,00	0,00	281.808.764,00	70,01	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Dana Rehabilitasi	21.670.030,00	15.169.025,00	0,00	15.169.025,00	70,01	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tebang (Lump Sum)	27.315.936,00	19.163.154,00	2.153.618,00	21.316.772,00	77,87	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	1.928.119.748,00	1.384.864.281,00	47.634.626,00	1.432.498.907,00	74,30	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pertambangan Perikanan	402.414.466,00	281.860.138,00	101.492.271,00	383.352.410,00	95,22	
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	23.258.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	0,00	16.281.045,00	8.977.601,00	23.258.646,00	100,00	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil dan Iuran Kuasa Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	650.963.789.000,00	650.963.789.000,00	0,00	650.963.789.000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	650.963.789.000,00	650.963.789.000,00	0,00	650.963.789.000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	60.926.780.000,00	45.873.236.000,00	15.226.445.000,00	60.926.780.000,00	100,00	
4 2 3 01	- Dana Alokasi Khusus	60.926.780.000,00	45.873.236.000,00	15.226.445.000,00	60.926.780.000,00	100,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	180.090.853.540,00	167.446.459.566,00	8.607.670.473,00	176.054.129.984,00	98,15	
4 3 1	Pendapatan Hibah	4.849.550.000,00	4.178.265,00	1.111.690.839,00	5.290.000,00	31,20	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.639.550.000,00	318.202.805,00	1.111.690.839,00	4.428.283.444,00	31	
4 3 1 01 01	Pemrintah	4.639.550.000,00	318.202.805,00	1.111.690.839,00	4.428.283.444,00	31	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	210.000.000,00	83.562.500,00	0,00	83.562.500,00	39,79	
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	210.000.000,00	83.562.500,00	0,00	83.562.500,00	39,79	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.165.338.040,00	25.602.129.201,00	6.862.509.639,00	31.165.338.040,00	100,00	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	31.165.338.040,00	25.602.129.201,00	6.862.509.639,00	31.165.338.040,00	100,00	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.240.840.889,00	5.619.545.204,00	1.320.995.440,00	7.240.840.889,00	100,00	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.535.366.043,00	4.516.959.811,00	1.019.409.432,00	5.535.366.043,00	100,00	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.616.538.135,00	9.613.548.094,00	2.002.980.071,00	11.616.538.135,00	100,00	
4 3 3 01 04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	77.696.531,00	104.819.617,00	-28.922.286,00	77.696.531,00	100,00	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.985.196.582,00	5.346.157.630,00	1.337.033.962,00	6.985.196.582,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APED-P 2014	REALISASI PEMERINTAH		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.346.968.000,00	139.346.968.000,00	0,00	139.346.968.000,00	100	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	139.346.968.000,00	139.346.968.000,00	0,00	139.346.968.000,00	100	
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	898.300.000,00	898.300.000,00	0,00	898.300.000,00	100	
4 3 4 01 03	Dana Tunjangan Pensiun Guru PNS Daerah	135.457.868.000,00	135.457.868.000,00	0,00	135.457.868.000,00	100	
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	3.000.300.000,00	3.000.300.000,00	0,00	3.000.300.000,00	100	
4 3 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Ferda Lar	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Sumbaw	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
TOTAL (1+2+3)		1.004.757.570.936,00	963.149.861.656,69	41.626.543.549,00	1.004.776.405.246,69	100,00	

Batusangkar, Januari 2015

AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 KABUPATEN PADANG DATAR
 BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ALJARMAY, SE
 NIP. 196410051983011004

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
KEADAAN BULAN DESEMBER 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.674.778,28,00	103.192.844,366,89	8.889.882.151,80	112.072.726.547,69	107,87	
4 1 1	Pajak Daerah	11.296.128.467,00	9.192.497.907,62	1.238.980.812,00	10.830.448.719,00	96,35	
4 1 1 01	Pajak Hotel	192.754.784,00	96.459.275,00	43.714.300,00	140.173.575,00	72,71	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	148.478.384,00	41.750.850,00	24.962.000,00	66.712.850,00	44,93	
4 1 1 01 08	Hotel Metal Dua	44.276.400,00	54.708.425,00	18.752.300,00	73.460.725,00	166,26	
4 1 1 02	Pajak Restoran	1.020.000.000,00	757.898.780,00	628.141.150,00	1.385.442.960,00	129,38	
4 1 1 02 01	Restoran	86.760.000,00	58.511.464,00	15.916.310,00	74.427.800,00	85,79	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	933.240.000,00	699.387.316,00	584.026.860,00	1.284.015.090,00	137,50	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	14.140.000,00	5.100.000,00	700.000,00	5.800.000,00	41,62	
4 1 1 03 13	Pacuan Kuda	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	50,00	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50,00	
4 1 1 03 15	Pertunjukan Kelongkasan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 18	Pusat Kebudayaan	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	1.500.000,00	500.000,00	700.000,00	1.300.000,00	86,67	
4 1 1 04	Pajak Reklame	128.138.585,00	99.545.242,00	38.982.122,00	130.227.364,00	101,63	
4 1 1 04 31	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	120.638.565,00	94.424.040,00	38.582.122,00	123.006.164,00	103,62	
4 1 1 04 32	Reklame Kain	5.000.000,00	5.221.200,00	0,00	5.221.200,00	104,42	
4 1 1 04 33	Reklame Melok/Siker	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 34	Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 35	Reklame Borden	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 05	Pajak Penarikan Jalan	6.220.268.000,00	5.877.265.090,00	526.398.422,00	6.403.664.512,00	102,95	
4 1 1 05 01	Pajak Penarikan Jalan PLN	6.220.268.000,00	5.877.265.090,00	526.398.422,00	6.403.664.512,00	102,95	
4 1 1 06	Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	161.800.870,00	130.718.334,00	18.188.806,00	148.916.290,00	92,76	
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah Tanah	161.800.870,00	130.718.334,00	18.188.806,00	148.916.290,00	92,76	
4 1 1 08	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.980.000,00	344.778.427,00	273.984.148,00	618.728.678,00	112,30	
4 1 1 08 05	Marmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 08 07	Pasir/Kavali	212.500.000,00	147.440.976,00	195.794.408,00	343.235.384,00	161,52	
4 1 1 08 08	Gresit/Andasit/Batu Beku	241.751.250,00	171.715.537,00	83.508.479,00	255.222.016,00	94,94	
4 1 1 08 09	Tanah Liat	97.728.750,00	25.621.914,00	14.685.262,00	40.271.178,00	41,29	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.233.005.058,00	948.518.283,00	278.183.734,00	1.226.702.027,00	54,65	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.233.005.058,00	948.518.283,00	278.183.734,00	1.226.702.027,00	54,65	
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	842.293.543,00	8.500.000,00	851.793.543,00	113,57	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	842.293.543,00	8.500.000,00	851.793.543,00	113,57	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
4 1 2	Retribusi Daerah	7.224.969.880,00	7.805.045.002,00	773.717.540,00	8.578.762.542,00	118,74	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3.094.105.000,00	3.050.510.515,00	209.982.123,00	3.260.492.638,00	105,38	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.704.051.530,00	1.440.211.000,00	99.442.000,00	1.539.653.000,00	89,83	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemertajuan/Kebersihan	250.000.000,00	113.180.000,00	21.580.000,00	134.760.000,00	53,90	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	83.720.000,00	37.503.000,00	2.250.000,00	39.753.000,00	47,38	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	657.814.400,00	624.325.670,00	51.881.720,00	676.207.390,00	102,71	
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	395.040.000,00	371.754.000,00	31.728.400,00	403.482.400,00	103,66	
4 1 2 01 08	Retribusi Pemrosesan Air Potable/Katakinan	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.000.000,00	1.800.000,00	120.000,00	1.920.000,00	32,00	
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan akses	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 2 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	457.001.845,00	0,00	457.001.845,00	RD/WD	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.421.883.880,00	3.339.270.740,00	532.082.740,00	3.871.353.480,00	113,13	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Karyawan Daerah	880.480.280,00	751.651.500,00	158.057.000,00	910.308.500,00	102,34	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Paralel	242.403.600,00	165.620.740,00	15.060.740,00	180.781.480,00	74,55	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	34.080.000,00	30.700.000,00	4.187.000,00	34.887.000,00	102,37	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Pungut Hewan	121.500.000,00	64.430.000,00	8.120.000,00	103.600.000,00	84,97	
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Parkir dan Olah-raga	2.133.000.000,00	2.256.618.000,00	343.943.000,00	2.600.561.000,00	123,81	
4 1 2 03	Retribusi Pertijuan Tertentu	709.300.000,00	1.415.234.247,00	31.732.780,00	1.446.967.027,00	204,02	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	1.054.458.119,00	3.229.830,00	1.057.687.949,00	272,67	
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Galian/Karantina	300.000.000,00	310.046.128,00	24.742.950,00	334.789.078,00	114,63	
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	9.000.000,00	9.735.000,00	1.750.000,00	11.485.000,00	127,64	
4 1 3	Hasil Peng. Karyawan Daerah Yg Dipisahkan	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Parus. Mtk Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/WD	
4 1 3 01 01	Pemakaian Daerah	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	
4 1 3 01 02	Bank Negeri	85.663.430,00	85.997.830,00	0,00	89.997.830,00	105,05	
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Parus. Modal pd Parus. Mtk Swasta	85.663.430,00	89.997.830,00	0,00	89.997.830,00	105,05	
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada BPR	84.844.837.028,00	84.983.481.197,89	8.335.213.899,00	93.319.695.096,89	110,65	
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70.000.000,00	138.862.200,00	22.017.800,00	160.879.200,00	239,84	
4 1 4 1	Hasil Perjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100	
4 1 4 01 02	Perjualan Perlatan/Peralengkapan Kantor tidak bergerak	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/WD	
4 1 4 01 16	Perjualan Hasil Pemertajuan	70.000.000,00	62.265.200,00	0,00	62.265.200,00	88,95	
4 1 4 01 06	Perjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	55.697.000,00	22.017.800,00	77.714.000,00	100	
4 1 4 01 17	Perjualan Hasil Perikanan	5.105.000.000,00	6.669.699.984,00	308.228.441,00	6.977.928.425,00	136,68	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	5.105.000.000,00	6.509.099.984,00	308.228.441,00	6.817.328.425,00	133,44	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	6.052.500.000,00	5.418.666.700,00	648.833.380,00	6.067.500.080,00	100,00	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.052.500.000,00	5.418.666.700,00	648.833.380,00	6.067.500.080,00	100,00	
4 1 4 03 01	Rakoning Deposito Pada Bank Negeri	6.052.500.000,00	5.418.666.700,00	648.833.380,00	6.067.500.080,00	100,00	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	53.607.337.028,00	57.912.022.313,89	5.361.134.988,00	63.273.157.301,89	118,09	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain	0,00	750.492.817,89	83.770.358,00	834.263.175,89	100	
4 1 4 15 01 01	-Denda	0,00	21.282.011,00	46.215.479,00	67.497.490,00	100	
4 1 4 15 01 02	-LHP	0,00	324.328.811,89	17.314.250,00	341.643.061,89	100	
4 1 4 15 01 03	-LHP/Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/WD	
4 1 4 15 01 04	-Penerimaan Lain-Lain	0,00	424.881.895,00	20.240.629,00	445.122.524,00	100	
4 1 4 15 01 05	Penerimaan Lain-lain Disahkan	0,00	4.900.000,00	1.000.000,00	5.900.000,00	100	
4 1 4 15 01 06	Penerimaan Lain-lain Dikses	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/WD	
4 1 4 15 01 07	Penerimaan Lain-lain Sanksi	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/WD	
4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	40.000.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.260,00	44.491.886.736,00	111,23	
4 1 4 17	Pendapatan Dana Koperasi JKN pada FKTP Mtk Pemertajuan	13.927.337.028,00	11.341.321.606,00	1.950.616.500,00	13.291.938.106,00	95,44	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-F 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERMBANGUNAN	771.451.215,000,00	744.414.107,147,00	22.219.913,700,00	766.634.110,847,00	99,38	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.292.492,000,00	14.219.499.147,00	954.918,700,00	14.496.387,847,00	75,13	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	16.720.769,000,00	12.424.293,700,00	954.918,700,00	12.499.172,400,00	75,29	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.178.922,000,00	6.147.304,900,00	2.477,100,00	6.149.782,000,00	63,96	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pd25 dan pd 29 NPCPD dan PPH	6.400.968,000,00	3.845.141,400,00	0,00	3.845.141,400,00	60,00	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Tambako	594.199,000,00	431.267,400,00	102.441,600,00	594.199,000,00	100,00	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.571.703,000,00	1.806.265,447,00	0,00	1.806.265,447,00	70,12	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Lunak Pemanfaatan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Lunak Pemanfaatan Hutan	252.037,000,00	124.723,699,00	0,00	124.723,699,00	49,48	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Dana Rehabilitasi	22.108,000,00	9.948,600,00	0,00	9.948,600,00	45,00	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Lunak Tetap (Lunak Tetap)	80.227,000,00	42.159,900,00	0,00	42.159,900,00	70,00	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Lunak Ekspansi dan Lunak Ekspansi (Riyah)	1.265.628,000,00	1.007.218,015,00	0,00	1.007.218,015,00	77,77	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Lunak Ekspansi dan Lunak Ekspansi (Riyah)	915.099,000,00	705.264,033,00	0,00	705.264,033,00	76,96	
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pangutan Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pangutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Perimbangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari Perimbangan Gas Bumi	26.380,000,00	18.452,000,00	0,00	18.452,000,00	70,00	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil dari SDA Perimbangan Pasas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	667.139.623,000,00	667.139.623,000,00	0,00	667.139.623,000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	667.139.623,000,00	667.139.623,000,00	0,00	667.139.623,000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	84.399.100,000,00	62.944.205,000,00	22.054.695,000,00	84.998.900,000,00	100,00	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	84.399.100,000,00	62.944.205,000,00	22.054.695,000,00	84.998.900,000,00	100,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	293.186.203,696,00	221.914.705,610,00	41.271,712,464,00	273.191,428,974,00	103,69	
4 3 1	Pendapatan Hibah	16.307.454,000,00	706.125,710,00	16.849,039,688,00	16.435,165,278,00	98,56	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.307.454,000,00	528.295,910,00	16.839,799,688,00	16.165,016,478,00	98,78	
4 3 1 01 01	Pemerintah	16.307.454,000,00	528.295,910,00	16.839,799,688,00	16.165,016,478,00	98,78	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	140.000,000,00	239.268,800,00	12.080,000,00	270.148,800,00	100,00	
4 3 1 03 02	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	140.000,000,00	239.268,800,00	12.080,000,00	270.148,800,00	100,00	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Penghasilan Daerah Lainnya	35.793.147,696,00	24.238.923,696,00	11.851,712,464,00	36.090,636,160,00	100,83	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Properti	7.503.459,412,00	5.052.856,100,00	2.817.499,312,00	7.870,355,412,00	102,15	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.828.802,918,00	3.771.719,700,00	1.233.078,218,00	5.004,796,918,00	86,06	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil Dari Bos Balik Namo Kendaraan Bermotor	13.788.989,235,00	9.345.600,000,00	3.676.441,235,00	13.022,001,235,00	94,56	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Reklamasi Beker Kendaraan Bermotor	1.247.842,383,00	389.108,900,00	848.853,363,00	1.247,942,363,00	100,00	
4 3 3 01 04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukiman	7.440,654,748,00	5.670.479,900,00	3.475.852,248,00	9.146,331,748,00	122,92	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok						

KODE BUKU	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	214.255.807.000,00	206.839.456.000,00	4.366.151.000,00	211.255.607.000,00	100,00	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	214.255.807.000,00	206.839.456.000,00	4.366.151.000,00	211.255.607.000,00	100,00	
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	1.393.046.000,00	1.393.000.000,00		1.393.000.000,00	100,00	
4 3 4 01 03	Dana Tanggapan Profesi Guru PNS Daerah	185.034.852.000,00	185.034.852.000,00		185.034.852.000,00	100,00	
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	100,00	
4 3 4 01 07	Dana Abkasi Desa/Nagari dan APBN	218.823.755.000,00	17.454.804.000,00	4.359.151.000,00	218.830.755.000,00	100,00	
4 3 8	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah lainnya	0,00	0,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00	
4 3 8 01	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah lainnya	0,00	0,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00	
TOTAL (1+2+3)		1.139.882.199.931,00	1.079.511.647.013,95	72.386.419.355,00	1.151.898.266.368,95	101,02	

Batasungkar, Januari 2016
AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASSET
SASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



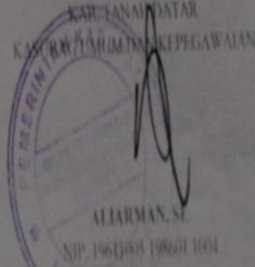
DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016
KEADAAN BULAN DESEMBER 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD -P 2016	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%
			NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>117.484.614.929,00</u>	<u>110.089.529.789,00</u>	<u>2.968.824.921,00</u>	<u>113.058.354.710,00</u>	<u>96,23</u>
4 1 1	Pajak Daerah	<u>12.379.061.602,00</u>	<u>9.759.261.942,00</u>	<u>1.225.723.714,00</u>	<u>10.984.985.656,00</u>	<u>88,74</u>
4 1 1 01	Pajak Hotel	<u>192.794.784,00</u>	<u>103.541.109,00</u>	<u>7.474.058,00</u>	<u>111.015.167,00</u>	<u>57,58</u>
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	148.476.384,00	51.284.667,00	3.038.058,00	54.322.725,00	36,59
4 1 1 01 06	Hotel Melati Dua	44.318.400,00	52.256.442,00	4.436.000,00	56.692.442,00	127,92
4 1 1 02	Pajak Restoran	<u>1.458.442.902,00</u>	<u>945.561.772,00</u>	<u>232.945.710,00</u>	<u>1.178.507.482,00</u>	<u>80,81</u>
4 1 1 02 01	Restoran	86.760.000,00	68.775.034,00	5.745.120,00	74.520.154,00	85,89
4 1 1 02 02	Rumah Makan	1.371.682.902,00	876.786.738,00	227.200.590,00	1.103.987.328,00	80,48
4 1 1 03	Pajak Hiburan	<u>18.900.000,00</u>	<u>9.943.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.943.500,00</u>	<u>52,61</u>
4 1 1 03 13	Picnic Kuda	9.000.000,00	9.443.500,00	0,00	9.443.500,00	104,93
4 1 1 03 14	Batu Kendaran Bermotor	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50,00
4 1 1 03 15	Pernikahan Kelengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 03 18	Pusat Kebugaran	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	<u>159.491.890,00</u>	<u>139.437.563,00</u>	<u>15.149.731,00</u>	<u>154.587.294,00</u>	<u>96,92</u>
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	151.991.890,00	131.047.693,00	15.149.731,00	146.197.424,00	96,19
4 1 1 04 02	Reklame Kain	5.000.000,00	8.389.870,00	0,00	8.389.870,00	167,80
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	<u>6.500.000.000,00</u>	<u>6.109.014.387,00</u>	<u>601.312.024,00</u>	<u>6.710.326.411,00</u>	<u>103,24</u>
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	6.500.000.000,00	6.109.014.387,00	601.312.024,00	6.710.326.411,00	103,24
4 1 1 06	Pajak Parkir	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	<u>158.714.458,00</u>	<u>122.480.726,00</u>	<u>23.499.913,00</u>	<u>145.980.639,00</u>	<u>91,98</u>
4 1 1 07 01	Pajak Air Bawah Tanah	158.714.458,00	122.480.726,00	23.499.913,00	145.980.639,00	91,98
4 1 1 09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<u>902.712.500,00</u>	<u>448.236.376,00</u>	<u>198.184.494,00</u>	<u>646.420.870,00</u>	<u>71,61</u>
4 1 1 09 06	Marmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 09 07	Pasir/Kerikil	361.678.250,00	245.738.446,00	105.399.322,00	351.137.768,00	97,09
4 1 1 09 08	Granit/Andasit/Batu Beku	435.367.500,00	158.096.276,00	80.307.821,00	238.404.097,00	54,99
4 1 1 09 09	Tanah Liat	105.666.750,00	43.401.654,00	12.477.351,00	55.879.005,00	52,88
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<u>2.233.005.068,00</u>	<u>1.020.741.509,00</u>	<u>133.767.284,00</u>	<u>1.154.508.793,00</u>	<u>51,70</u>
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.233.005.068,00	1.020.741.509,00	133.767.284,00	1.154.508.793,00	51,70
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<u>750.000.000,00</u>	<u>860.305.000,00</u>	<u>13.390.500,00</u>	<u>873.695.500,00</u>	<u>116,49</u>
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	860.305.000,00	13.390.500,00	873.695.500,00	116,49

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD - P 2016	REALISASI		6	7	8
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5			
		8.009.619.000,00	7.018.263.434,00	639.840.831,00	7.858.104.265,00	95,61	
		3.055.175.200,00	2.453.837.070,00	189.833.160,00	2.643.470.230,00	86,52	
4 1 2	Retribusi Daerah						
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	1.634.408.800,00	1.257.580.500,00	120.293.000,00	1.377.873.500,00	84,30	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	251.000.000,00	96.874.000,00	9.285.000,00	106.159.000,00	42,29	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemukiman/Kebersihan	65.830.000,00	46.030.000,00	6.000.000,00	52.030.000,00	79,04	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	679.340.400,00	650.222.570,00	28.657.380,00	678.879.950,00	99,93	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	399.440.000,00	392.995.000,00	25.177.800,00	418.172.800,00	104,69	
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.158.000,00	4.735.000,00	0,00	4.735.000,00	113,88	
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	5.400.000,00	240.000,00	5.640.000,00	80,57	
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 2 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	4.415.443.800,00	4.007.985.410,00	366.240.980,00	4.374.226.390,00	99,07	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.057.651.800,00	901.962.350,00	121.739.000,00	1.023.701.350,00	96,79	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	215.572.000,00	129.621.060,00	8.567.980,00	138.189.040,00	64,10	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Perkotaan	34.080.000,00	27.373.000,00	5.835.000,00	33.208.000,00	97,44	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	121.920.000,00	92.995.000,00	5.400.000,00	98.395.000,00	80,70	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Polong Hewan	2.859.500.000,00	2.765.945.000,00	220.679.000,00	2.986.624.000,00	104,45	
4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	126.720.000,00	90.099.000,00	4.020.000,00	94.119.000,00	74,27	
4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	539.000.000,00	556.440.954,00	83.966.691,00	640.407.645,00	118,81	
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	280.000.000,00	208.779.526,00	52.148.319,00	260.927.845,00	93,19	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	338.401.428,00	31.748.372,00	370.149.800,00	148,06	
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	9.000.000,00	9.260.000,00	70.000,00	9.330.000,00	103,67	
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	22.121.008.827,00	22.071.008.827,00	0,00	22.071.008.827,00	99,77	
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	22.068.050.785,00	22.018.050.785,00	0,00	22.018.050.785,00	99,77	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Perus. Mik Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	22.018.050.785,00	22.018.050.785,00	0,00	22.018.050.785,00	100,00	
4 1 3 01 02	Bank Nagari	52.958.062,00	52.958.062,00	0,00	52.958.062,00	100,00	
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Perus. Modal pd Perus. Mik Swasta	52.958.062,00	52.958.062,00	0,00	52.958.062,00	100,00	
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada BPR	74.874.825.900,00	71.240.995.586,00	1.103.260.378,00	72.344.255.962,00	96,49	
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Peternakan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	2.000.609,00	6.220.693.181,00	105,96	
4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	5.870.750.000,00	6.218.692.572,00	2.000.609,00	6.220.693.181,00	105,96	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	5.870.750.000,00	6.218.692.572,00	0,00	6.541.666.800,00	105,72	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	6.187.500.000,00	6.541.666.800,00	0,00	6.541.666.800,00	105,72	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.187.500.000,00	6.541.666.800,00	0,00	6.541.666.800,00	105,72	
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Nagari	62.911.675.500,00	58.480.636.214,00	1.101.258.767,00	59.581.895.981,00	94,71	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	0,00	2.189.089.590,00	17.460.267,00	2.206.549.857,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain	0,00	68.620.256,00	5.715.167,00	74.335.423,00	100	
	-Denda	0,00	2.073.881.717,00	0,00	2.073.881.717,00	100	
	-LHP	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	-LHP/Giro	0,00	0,00	0,00	58.332.717,00	100	
	-Pengembalian 2013	0,00	46.587.617,00	11.745.100,00	5.900.000,00	100	
	-Penerimaan Lain-Lain	0,00	5.400.000,00	500.000,00	0,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Disnakan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Dinkes	0,00	0,00	0,00	44.203.331.624,00	92,09	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Setda	48.000.000.000,00	44.203.331.624,00	1.083.299.500,00	13.166.114.500,00	88,29	
4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	14.911.675.500,00	12.082.815.000,00				
4 1 4 17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah						

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD - P 2016	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
			917.032.329.495,00	0,00	917.032.329.495,00	90,25	
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.016.082.100.400,00	15.508.495.045,00	0,00	15.508.495.045,00	100,50	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Bukan Pajak)	13.992.493.000,00	14.780.951.950,00	0,00	14.780.951.950,00	105,63	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	6.921.999.000,00	7.705.714.535,00		7.705.714.535,00	111,32	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.330.260.000,00	6.487.107.434,00		6.487.107.434,00	102,48	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Paj 25 dan paj 29 NPOPDN dan PPH	740.234.000,00	587.729.681,00		587.729.681,00	79,40	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.439.309.000,00	727.943.095,00	0,00	727.943.095,00	50,58	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	170.329.000,00	123.037.409,00		123.037.409,00	72,24	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Kehutanan	1.492.000,00	17.814.146,00		17.814.146,00	1.193,98	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	66.900.000,00	58.560.251,00		58.560.251,00	87,53	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	84.894.000,00	55.305.750,00		55.305.750,00	65,15	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.089.194.000,00	452.025.539,00		452.025.539,00	41,50	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Perikanan	26.500.000,00	21.200.000,00		21.200.000,00	80,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	707.992.904.000,00	707.992.904.000,00	0,00	707.992.904.000,00	100,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	707.992.904.000,00	707.992.904.000,00		707.992.904.000,00	100,00	
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	292.657.394.400,00	193.530.930.450,00	0,00	193.530.930.450,00	66,13	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	105.272.538.000,00	58.102.900.000,00	0,00	58.102.900.000,00	54,67	
4 2 3 01	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.385.710.000,00	1.862.141.000,00		1.862.141.000,00	55	
4 2 3 01 01	DAK Bidang Pendidikan	16.372.210.000,00	5.646.636.000,00		5.646.636.000,00	34	
4 2 3 01 02	DAK Bidang Kesehatan	644.242.000,00	0,00		0,00	0	
4 2 3 01 03	DAK Keluarga Berencana	376.520.000,00	0,00		0,00	0	
4 2 3 01 06	DAK Prasarana Sanitasi	460.190.000,00	460.191.000,00		460.191.000,00	100,00	
4 2 3 01 07	DAK Prasarana Air Minum/Penyehatan Lingkungan	1.064.937.000,00	354.174.000,00		354.174.000,00	33	
4 2 3 01 09	DAK Kelautan dan Perikanan	3.273.033.000,00	1.084.452.000,00		1.084.452.000,00	33	
4 2 3 01 10	DAK Pertanian	695.492.000,00	499.077.000,00		499.077.000,00	72	
4 2 3 01 11	DAK Lingkungan Hidup	801.265.000,00	0,00		0,00	0	
4 2 3 01 12	DAK Kehutanan	219.300.000,00	65.790.000,00		65.790.000,00	30	
4 2 3 01 15	DAK Keselamatan Transportasi Darat	906.215.000,00	302.301.000,00		302.301.000,00	33	
4 2 3 01 16	DAK Pariwisata	78.073.424.000,00	47.828.138.000,00		47.828.138.000,00	61	
4 2 3 01 17	DAK Infrastruktur Publik Daerah	186.384.856.400,00	135.428.030.450,00	0,00	135.428.030.450,00	72,66	
4 2 3 02	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.980.000.000,00	4.980.000.000,00		4.980.000.000,00	100	
4 2 3 02 01	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	171.944.406.400,00	124.329.478.450,00		124.329.478.450,00	72	
4 2 3 02 02	DAK Tunjangan Profesi Guru	1.477.500.000,00	1.182.000.000,00		1.182.000.000,00	80	
4 2 3 02 03	DAK Tambahan Penghasilan Guru	5.888.000.000,00	4.275.052.000,00		4.275.052.000,00	73	
4 2 3 02 04	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	436.120.000,00	0,00		0,00	0	
4 2 3 02 06	DAK Akreditasi Puskesmas	997.330.000,00	0,00		0,00	0	
4 2 3 02 07	DAK Jaminan Persalinan	661.500.000,00	661.500.000,00		661.500.000,00	100,0	
4 2 3 02 08	DAK Bantuan Operasional KB	107.924.317.496,00	83.598.085.200,00	14.060.401.496,00	97.658.486.696,00	90,49	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.623.260.000,00	88.443.200,00	5.135.000,00	93.578.200,00	1,23	
4 3 1	Pendapatan Hibah	7.623.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	7.623.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
4 3 1 01 01	Pemerintah	0,00	88.443.200,00	5.135.000,00	93.578.200,00	100,00	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	-	88.443.200,00	5.135.000,00	93.578.200,00	100,00	
4 3 1 03 01	Badan /Lembaga/Organisasi Swasta	-	88.443.200,00	5.135.000,00	93.578.200,00	100,00	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.509.220.496,00	25.434.605.000,00	14.055.266.496,00	39.489.871.496,00	99,95	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	39.509.220.496,00	25.434.605.000,00	14.055.266.496,00	39.489.871.496,00	99,95	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.406.701.344,00	5.304.656.700,00	3.585.343.644,00	8.890.000.344,00	105,75	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.643.742.427,00	3.483.316.900,00	1.748.422.527,00	5.231.739.427,00	92,70	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.027.134.508,00	9.084.814.900,00	3.638.595.608,00	12.723.410.508,00	90,71	
4 3 3 01 04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	777.446.384,00	399.108.500,00	525.533.884,00	924.642.384,00	118,93	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.654.195.633,00	7.162.708.000,00	4.557.370.833,00	11.720.078.833,00	110,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD - P 2016	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
		53.999.837.000,00	53.999.837.000,00	0,00	53.999.837.000,00	100	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.999.837.000,00	53.999.837.000,00	0,00	53.999.837.000,00	100	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	100	
4 3 4 01 06	Dana Insentif Daerah	48.999.837.000,00	48.999.837.000,00		48.999.837.000,00	100	
4 3 4 01 07	Dana Alokasi Desa/Nagan dan APBN	6.792.000.000,00	4.075.200.000,00	0,00	4.075.200.000,00	100	
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Daerah Lainnya	6.792.000.000,00	4.075.200.000,00		4.075.200.000,00	100	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Propinsi Sumatera Barat			17.829.226.417,00	1.127.749.170.961,00	96,84	
TOTAL (1+2+3)		1.241.491.032.825,00	1.118.719.944.484,00				

Batasangkar, Desember 2016
 AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET
 KABUPATEN DATAR
 KABUPATEN DATAR
 KANTOR UMUM PEKERJAAN

 M. JARMAN, S1
 NIP. 196308081986011004

PASAR TRADISIONAL/RAKYAT
KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Titik Koordinat	Kondisi Pasar *	Luas Lahan	Kepemilikan Lahan **	Unit Kerja Pengelola	Hari Buka Pasar ***	Jumlah Pedagang	Rata-rata omzet/bulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pasar Rabai	Negeri Pariangan Kecamatan X Koto	1950	00° 25' 54.9" LS 100° 24' 03.7" BT	Sedang	10.000 M2	Negeri/Adat	Negeri	2 Kali (Rabu dan Sabtu)	125	425.000.000,-
2	Pasar Koto Baru	Negeri Koto Baru Kecamatan X Koto	1884	00° 27' 36.4" LS 100° 24' 11.1" BT	Sedang/Baik	10.000 M2	Negeri	Negeri	2 Kali (Senin dan Selasa)	480	8.200.000.000,-
3	Pasar Baruah	Negeri Pandai Silek Kecamatan X Koto	1926	00° 24' 22.7" LS 100° 23' 38.9" BT	Sedang	2.500 M2	Negeri	Negeri	2 Kali (Minggu dan Kamis)	65	400.000.000,-
4	Pasar Patah Bangsi	Negeri Patah Kecamatan Batipuh	1984	00° 29' 53.7" LS 100° 28' 35.5" BT	Sedang	900 M2	Negeri	Negeri	1 Kali (Minggu)	575	2.500.000.000,-
5	Pasar Kubu Kerambia	Negeri Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh	1926	00° 29' 08.6" LS 100° 28' 01.8" BT	Kurang	1.000 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Selasa)	120	125.000.000,-
6	Pasar Ladang Laweh	Negeri Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh	1980	00° 29' 30.6" LS 100° 29' 01.8" BT	Kurang	130 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Rabu)	51	100.000.000,-
7	Pasar Bata Gadang	Negeri Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh	1930	00° 28' 08.6" LS 100° 27' 10.8" BT	Kurang	120 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Kamis)	95	110.000.000,-
8	Pasar Balai Kamis	Negeri Tanjung Baruah Kecamatan Batipuh	1928	00° 29' 29.4" LS 100° 29' 52" BT	Sedang	400 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Kamis)	134	110.000.000,-
9	Pasar Malilo	Negeri Malilo Kecamatan Batipuh Selatan	1982	00° 24' 48.3" LS 100° 29' 23.7" BT	Sedang	300 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Selasa)	65	850.000.000,-
10	Pasar Simabur	Negeri Simabur Kecamatan Parangan	1909	00° 27' 40.4" LS 100° 30' 37.1" BT	Sedang	1.500 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Senin)	488	2.550.000.000,-
11	Pasar Onbilin	Negeri Simawang Kecamatan Rambatan	1926	00° 33' 33.3" LS 100° 32' 59.1" BT	Sedang/Baik	700 M2	Negeri	Negeri	2 Kali (Rabu dan Minggu)	89	975.000.000,-
12	Pasar Rambatan	Negeri Rambatan Kecamatan Rambatan	1920	00° 29' 00.8" LS 100° 33' 14.4" BT	Sedang/Baik	10.000 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Selasa)	391	2.400.000.000,-
13	Pasar Balmbing	Negeri Balmbing Kecamatan Rambatan	1920	00° 31' 14.4" LS 100° 34' 30.8" BT	Sedang/baik	500 M2	Negeri	Koperasi	1 kali (Sabtu)	299	957.000.000,-
14	Pasar Turawan	Negeri III Koto Kecamatan Rambatan	1960	00° 31' 14.4" LS 100° 34' 30.8" BT	Kurang	300 M2	Negeri	Negeri		55	
15	Pasar Sungai Tarab	Negeri Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab	2013	00° 25' 00.4" LS 100° 34' 04.5" BT	Baik	10.000 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Rabu)	750	3.100.000.000,-
16	Pasar Rao-Rao	Negeri Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab	1926	00° 22' 35.7" LS 100° 33' 22.1" BT	Sedang	800 M2	Negeri	Negeri	2 Kali (Rabu dan Sabtu)	380	151.000.000,-
17	Pasar Pate Laweh	Negeri Pate Laweh Kec. Sungai Tarab									
18	Pasar Gurun	Negeri Gurun Kecamatan Sungai Tarab	1961	00° 28' 43" LS 100° 33' 22.7" BT	Rusak	2.400 M2	Negeri	Negeri	1 Kali (Sabtu)	65	150.000.000,-
19	Pasar Tabek Patah	Negeri Tabek Patah Kecamatan Salimpaung	2013	00° 19' 41.0" LS 100° 32' 06.5" BT	Baik	5.658 M2	Negeri	Negeri	1 kali (Rabu)	623	3.700.000.000,-
20	Pasar Salimpaung	Negeri Salimpaung Kecamatan Salimpaung	1970	00° 21' 14.1" LS 100° 32' 50.6" BT	Sedang	2.000 M2	Negeri	Negeri	1 Kali (Jumat)	300	250.000.000,-
21	Pasar Alhad	Negeri Sumarik Kecamatan Salimpaung	1905	00° 22' 49.6" LS 100° 34' 37.8" BT	Sedang	5.930 M2	Negeri	Negeri	1 Kali (Minggu)	100	153.000.000,-
22	Pasar Stumbuk	Negeri Stumbuk Negeri Salimpaung	1960	00° 21' 36.1" LS 100° 34' 31.8" BT	Rusak	1.213 M2	Negeri	Negeri	1 Kali (Kamis)	83	151.000.000,-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasar Pakan Kamis	Nagari Tanjung Alam Kec. Tanjung Baru	19	00° 18' 11.6" LS 100° 31' 56.7" BT	Sedang	900 M2	Nagari	Nagari	2 Kali (Senin dan Kamis)	145	800.000.000,-
Pasar Pakan Sabtu	Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru	1920	00° 17' 42.4" LS 100° 33' 37.5" BT	Sedang	1.350 M2	Nagari	Nagari	2 Kali (Sabtu dan Selasa)	123	150.000.000,-
25 Pasar Tanjung	Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang	1812	00° 23' 42.5" LS 100° 36' 40.5" BT	Sedang	10.000 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Jumat)	102	225.000.000,-
26 Pasar Sungayang	Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang	1916	00° 24' 10.5" LS 100° 36' 09.2" BT	Sedang	480 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Senin)	273	850.000.000,-
27 Pasar Baruh Bulak	Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang	2007	00° 23' 25.1" LS 100° 36' 50.3" BT	Baik	300 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Jumat)	63	117.000.000,-
28 Pasar Minggu	Nagari Saraso Kecamatan Tanjung Emas	1937	00° 29' 10.2" LS 100° 38' 08.7" BT	Sedang	500 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Minggu)	167	1.130.000.000,-
29 Pasar Balai Sabtu	Nagari Tanjung Barulak Kec. Tanjung Emas	2010	00° 29' 10.8" LS 100° 40' 32.9" BT	Sedang	100 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Sabtu)	71	150.000.000,-
30 Pasar Balai Selasa	Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas	2012	00° 28' 46.3" LS 100° 39' 19.4" BT	Baik	3.600 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Selasa)	25	160.000.000,-
31 Pasar Guguk Ciko	Nagari Tanjung Barulak Kec. Tanjung Emas	2002	00° 30' 06.9" LS 100° 41' 47.5" BT	Kurang	400 M2	Kontrak	Nagari	1 Kali (Sabtu)	61	111.000.000,-
32 Pasar Rabu	Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting	1984	00° 31' 30.7" LS 100° 41' 07.0" BT	Kurang	7.500 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Rabu)	355	675.000.000,-
33 Pasar Ambek Atar	Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting	1984	00° 31' 06.0" LS 100° 43' 28.6" BT	Kurang	500 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Rabu)	50	100.000.000,-
34 Pasar Senin	Nagari Taratak VIII Atar Kec. Padang Ganting	1984	00° 32' 15.8" LS 100° 44' 18.1" BT	Kurang	2.000 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Senin)	87	350.000.000,-
35 Pasar Baringin Ungka	Nagari Taratak XII Atar Kec. Padang Ganting	1984	00° 32' 53.3" LS 100° 45' 37.0" BT	Sedang	2.500 M2	Kontrak	Nagari	1 Kali (Jumat)	147	875.000.000,-
36 Pasar Taluak	Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo	1935		Sedang	35 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Senin)	50	110.000.000,-
37 Pasar Buo	Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo	1902	00° 28' 01.2" LS 100° 45' 31.1" BT	Sedang	420 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Minggu)	137	890.000.000,-
38 Pasar Tigo Jangko	Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo	1920	00° 29' 55.9" LS 100° 46' 33.0" BT	Sedang	450 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Jumat)	163	900.000.000,-
39 Pasar Balai Selasa	Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara			Kurang	250 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Selasa)	27	115.000.000,-
40 Pasar Balai Tengah	Nagari Balai Tengah Kec. Lintau Buo Utara	1984	00° 24' 50.2" LS 100° 43' 57.5" BT	Sedang	1.500 M2	Nagari	Nagari	1 Kali (Kamis)	160	7.100.000.000,-
41 Pasar Rambah Batu	Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara		00° 22' 24.8" LS 100° 43' 25.3" BT	Sedang		Nagari	Nagari	1 Kali (Sabtu)		115.000.000,-
42 Pasar Serikat C. Batusangkar	Nagari Baringin Kecamatan Lima kaum		00° 27' 26.4" LS 100° 35' 55.4" BT	Baik		Nagari		7 Kali (Senin - Minggu)		21.375.000.000,-

Batusangkar, Maret 2014
BUPATI TANAH DATAR

Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, SH, MM

